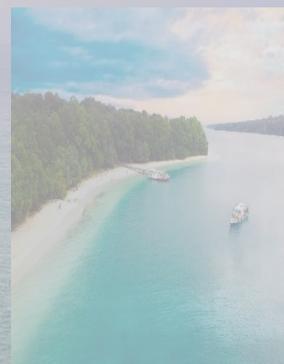




# RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029

2025-2029



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN**  
**DINAS PARIWISATA**  
**KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)**  
Jl. Syech Nawawi, Palima - Serang Telp. / Fax. (0254) 267060, 267070

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PARIWISATA**

**PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 500.13/Kep.112/DISPAR/VIII/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2025 - 2029**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 8);
  11. **Peraturan Gubernur nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;**
  12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);

**MEMUTUSKAN :**

Memperhatikan : Surat Edaran Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor 53 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029 dengan susunan yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum ke satu bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun Dokumen Perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Rencana Perangkat Daerah.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Plt . KEPALA DINAS**



**LINDA ROHYATI FATIMAH S.Sos, M.Si**

Lampiran I :

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2029

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENTRA)  
DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029**

- I. Ketua** : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten.  
**II. Sekretaris** : Sekretaris Dinas Pariwisata  
**III. Anggota** : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;  
2. Sumarsono SE (Perencana Ahli Muda)  
3. Setio Suryo Suncoko, S.Pd (Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan)  
4. Chairul Anwar, A.Md (Pengelola Bahan Perencanaan)  
5. Mungghah Jaya Mandala, S.STP., M.A.P (Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran)  
6. Noor Azizah, SE (Penata Layanan Operasional)

**IV. Kelompok Kerja (POKJA)**

**1. Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Destinasi Pariwisata**

- a. Ketua : Kepala Bidang Destinasi Pariwisata  
b. Anggota : Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Bidang Destinasi Pariwisata

**2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata**

- a. Ketua : Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata  
b. Anggota : Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Bidang Pemasaran Pariwisata

**3. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

- a. Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif  
b. Anggota : Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Bidang Pengembangan Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

**4. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**

- a. Ketua : Kepala Bidang Destinasi Pariwisata  
b. Anggota : Fungsional Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

**Plt . KEPALA DINAS**



**LINDA ROHYATI FATIMAH S.Sos, M.Si**

## Lampiran II

Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029

### **URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN TAHUN 2025-2029**

#### **I. Ketua, bertugas**

Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029

#### **II. Sekretaris, bertugas**

membantu ketua untuk mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

#### **III. Anggota Tim, bertugas**

melaksanakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yang meliputi :

- a. Mempersiapkan pelaksanaan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang;
- b. Mempersiapkan pembahasan pengolahan data dan informasi analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- c. Melakukan evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
- d. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;
- e. Melakukan sinkronisasi penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

#### **IV. Kelompok Kerja (POKJA)**

##### **a. Ketua, bertugas**

Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang, pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, perumusan tujuan dan sasaran, penyelarasan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan arah rencana pembangunan Dinas Pariwisata serta penajaman terhadap indikator dan target kinerja di kelompok kerja bidang masing-masing;

**b. Anggota, bertugas**

- 1) Membantu melakukan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 2) Membantu melakukan pengelohan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 3) Membantu melakukan pengkajian evaluasi Renja Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun lalu berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 4) Membantu melaksanakan penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas pariwisata Provinsi Banten di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 5) Membantu melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Banten Daerah;
- 6) Membantu melaksanakan penyelarasan progam, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten dengan arah rencana pembangunan Provinsi Banten;
- 7) Membantu melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan di kelompok kerja bidang masing-masing;
- 8) Membantu penentuan sasaran dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Banten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu di kelompok kerja bidang masing-masing.

**Plt . KEPALA DINAS**



**LINDA ROHYATI FATIMAH S.Sos, M.Si**

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 pada Dinas pariwisata Provinsi Banten sesuai Dengan waktu yang ditetapkan.



Sesuai dengan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Rencana Strategis disusun sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, dengan periode perencanaan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029

Renstra ini memuat Visi dan Misi Provinsi Banten yang dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Pariwisata sesuai tugas dan fungsinya yang berdoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029. Renstra ini akan menjadi pijakan dasar dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan sebagai salah satu sistem kendali di dalam implementasi pelaksanaan program kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu kelancaran pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten. Kami menyadari keterbatasan dan kekurangan dalam Penyusunan Renstra ini, sehingga saran dan masukan masih kami perlukan demi kesempurnaan di waktu yang akan datang.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Serang, 15 Agustus 2025

**Pt.KEPALA DINAS PARIWISATA  
PROVINSI BANTEN**

**LINDA ROHYATI FATIMAH S.Sos, M.Si**

**Pembina Tk I /IV b**

**NIP. 197306082002122003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II      GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>6</b>
2.1. Gambaran Pelayanan.....	6
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi .....	6
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	12
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan .....	31
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	32
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah .....	32
2.2.2 Isu Setrategis.....	55
<b>BAB III     TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>57</b>
3.1. Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	57
3.2. Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	58
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	59
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	63
<b>BAB IV     PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>64</b>
<b>BAB V      PENUTUP</b>	<b>102</b>

## LAMPIRAN

### DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi dan Jumlah personil .....	12
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan .....	13
Tabel 2.3	Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan .....	13
Tabel 2.4	Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti.....	14
Tabel 2.5	Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki .....	17
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Periode 2023 - 2026.....	21
Tabel 2.7	Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Banten, 2020 – 2024 .....	23
Tabel 2.8	Jumlah Data Per Kategori Pariwisata Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 .....	23
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2023 – 2026.....	25
Tabel 2.10	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi RPJPD .....	34
Tabel 2.11	Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata .....	39
Tabel 2.12	Target Kinerja Kementerian Pariwisata.....	41
Tabel 2.13	Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Lini Masa Kemenekraf/Bekraf Periode 2025-2029 .....	43
Tabel 2.14	Target Kinerja Kemenekraf/Bekraf 2025-2029 .....	46
Tabel 2.15	Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga .....	46
Tabel 2.16	Pengaruh Indikator Program Struktur Ruang RTRW Provinsi Banten terhadap Layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029 .....	52
Tabel 2.17	Pengaruh Indikator Program Pola Ruang RTRW Provinsi Banten terhadap Layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029 .....	53
Tabel 3.1	Misi, Tujuan , Indikator Tujuan Perangkat Daerah (Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	57
Tabel 3.2	Sasaran Perangkat Daerah, Indikator Sasaran .....	59
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran .....	60
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah .....	65
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah .....	67
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah .....	77
Tabel 4.4	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan .....	78

Tabel 4.5	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	99
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Utama.....	100
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Kunci.....	101

### **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.2	Penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten .....	6

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dinas Pariwisata Provinsi Banten merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berada di bawah Pemerintahan Provinsi Banten, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan daerah di bidang Pariwisata serta fungsi dinas sebagai perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata.

Seiring perkembangan reformasi birokrasi, peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pengemban tugas pengelola urusan pemerintahan harus mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara akuntabel atas kinerja yang dihasilkan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap penggunaan sumber daya, sumber dana serta fasilitas/aset yang dimiliki OPD dalam rangka pencapaian sasaran maupun tujuan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja OPD merupakan bagian dari suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang diimplementasikan terintegrasi secara paralel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan.

Hal yang sangat mendasar dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Perencanaan. Perencanaan merupakan proses awal menentukan sasaran maupun tujuan serta cara-cara yang ditempuh dalam pencapaiannya. Fungsi perencanaan sangatlah esensial karena dalam kenyataannya perencanaan memegang peranan lebih besar dibanding fungsi-fungsi lainnya, yaitu pelaksanaan, evaluasi maupun pelaporan yang merupakan implementasi dari hasil sebuah perencanaan.

Kaitan perencanaan dalam ruang lingkup pemerintahan, sebagaimana Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun).

Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang menjadi acuan bagi OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 – 2029 setelah berakhirnya Rencana Strategis (RENSTRA) 2023 - 2026 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun kedepan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten 2025-2029 merupakan penjabaran visi, misi, sasaran, tujuan, strategi, kebijakan serta program kegiatan dan perkiraan kebutuhan pendanaan

selama periode 5 tahun kedepan (2025-2029) yang telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang pariwisata dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan kepariwisataan di Provinsi Banten.

Aspek lain yang menjadi faktor pertimbangan dan perhatian dalam perumusan Renstra Dinas Pariwisata, diantaranya :

- 1) Evaluasi kinerja dan potensi sumber daya organisasi Dinas Pariwisata;
- 2) Analisa lingkungan organisasi untuk melihat peluang dan tantangan;
- 3) Isu-isu strategis yang berkembang saat ini maupun perkiraan di masa mendatang.

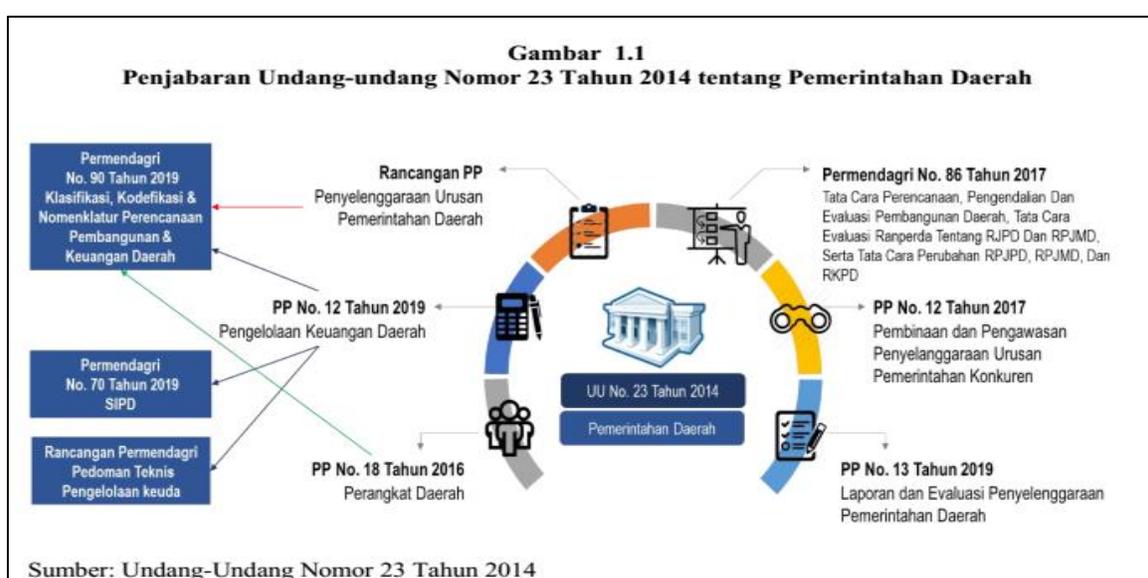
Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di bidang Pariwisata yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam periode 2025-2029 ke depan secara umum meliputi : (1) Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain (2) keterbatasan inovasi pengembangan pariwisata banten (3) keterbatasan “unig” atau daya tarik wisata di provinsi banten dalam skala besar (4) investasi yang belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal (5) dinamika globalisasi yang berakulturasi dengan dinamika sosial masyarakat di Provinsi Banten termasuk di destinasi wisata (6) infrastruktur dan fasilitas wisata kurang mendukung, serta (7) belum optimalnya dukungan masyarakat, organisasi profesi, pelaku pariwisata serta dunia usaha dalam pembangunan pariwisata di Provinsi Banten. Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2025-2029 tidak terlepas dari tugas pokok, fungsi dan kewenangan bidang teknis yang saling mengisi dan bersinergi satu sama lain. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa bidang teknis memiliki peranan dalam mendukung pelaksanaan kewenangan OPD di bidang Pariwisata.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan, Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur penunjang urusan pemerintahan, Unsur pemerintahan umum sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dokumen Renstra pada dasarnya menjabarkan suatu rencana strategis yang erat kaitannya dengan proses menetapkan arah, tujuan dan masa depan yang akan dicapai lima tahun mendatang secara komprehensif untuk mencapai tujuan, mengarahkan pengambilan keputusan serta berbagai tindakan dengan menghubungkan sumber daya dan dana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu institusi pemerintahan. Penjabaran keterkaitan dokumen perencanaan, penyelenggaraan pemerintahan daerah, perangkat daerah, dan pengelolaan

keuangan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tercantum dalam Gambar dibawah ini.

Penyusunan Rencana Strategis OPD Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Selain itu diselarasakan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Di dalam penyusunan Rencana Strategis, dijabarkan rencana kerja tahunan yang selanjutnya menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja OPD. Dokumen Renstra juga berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode 2025-2029.



**Gambar 1.2**  
**Penjabaran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

### 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025 2029 disusun dengan berlandaskan pada :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Otonomi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4965);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
15. Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah nomor ..... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Dinas Pariwisata ini dimaksudkan untuk kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RENSTRA tahun 2025-2029. Adapun tujuannya adalah untuk:

1. Memberikan landasan operasional bagi Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya
2. Menetapkan proiritas program dan kegiatan yang strategis yang selaras dengan perkembangan dan penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Daerah
3. Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan kepariwisataan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PARIWISATA PROVINSI BANTEN**

Bab ini Berisi tentang Tugas, Fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan. pada subbab dua memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isi strategis

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat tujuan renstra dinas pariwisata tahun 2025-2029, sasaran renstra dinas pariwisata tahun 2025-2029, strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra dinas pariwisata tahun 2025-2029, arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra dinas pariwisata 2025-2029.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra dinas pariwisata tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat di antaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

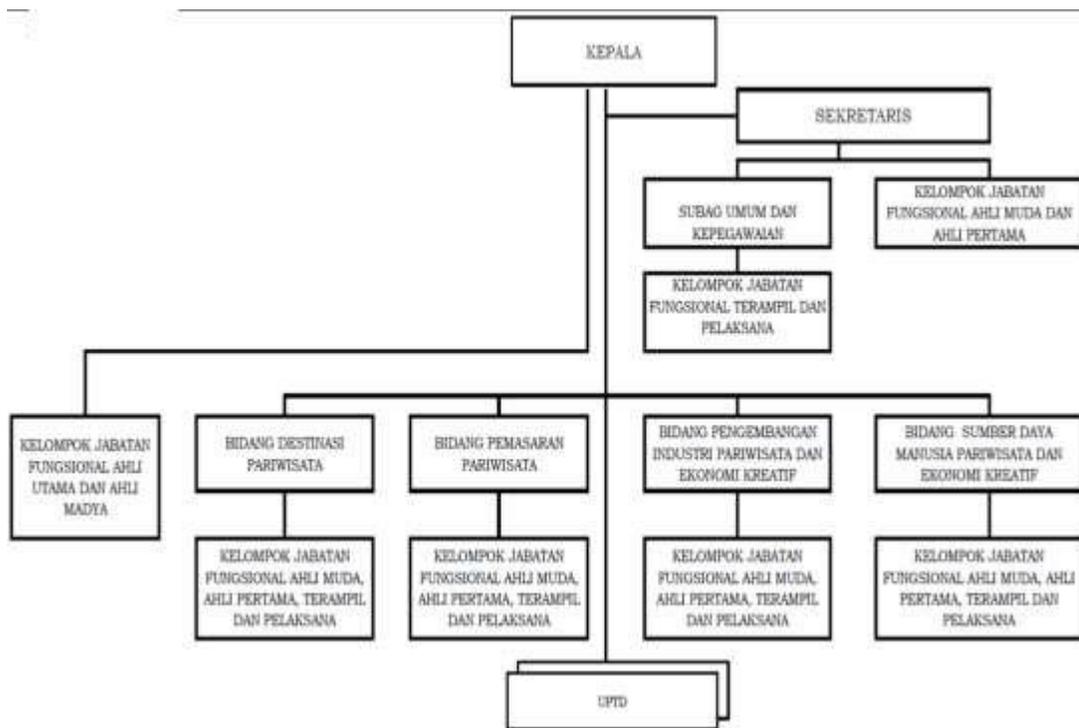
**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**  
**PERANGKAT DAERAH**

**2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bersarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2002, mengalami reorganisasi menjadi Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016. Kedudukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pariwisata yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

**2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi dan struktur Perangkat Daerah**

Peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Daerah.



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Banten**

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- 2) Pemasaran Pariwisata;

- 3) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- 4) Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah rincian tugas pokok dan fungsi, seluruh komponen Dinas Pariwisata Provinsi Banten :

#### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Merumuskan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di Lingkungan Dinas Pariwisata;
- 2) Menetapkan Rencana Kerja Dinas Pariwisata;
- 3) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan program yang telah ditetapkan;
- 4) Membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pariwisata sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku;
- 5) Merumuskan penyelenggaraan;
  - a. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata,
  - b. Pemasaran pariwisata;
  - c. Pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
  - d. Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi, dan pelaporan Dinas Pariwisata;
- 8) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sekretaris

- a. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pariwisata dalam melaksanakan perumusan, penetapan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan tugas.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
  - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Sekretariat berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
  - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Sekretariat;

- 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
  - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
  - 5) Merencanakan rumusan kebijakan perencanaan, pengendalian, evaluasi, pelaporan program/kegiatan, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pariwisata;
  - 6) Menyelenggarakan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas;
  - 7) Menyelenggarakan Administrasi Keuangan Dinas;
  - 8) Menyelenggarakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
  - 9) Menyelenggarakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
  - 10) Menyelenggarakan Administrasi Umum Dinas;
  - 11) Menyelenggarakan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
  - 12) Menyelenggarakan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 13) Menyelenggarakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
  - 14) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan dinas;
  - 15) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif kegiatan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
  - 16) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sekretariat;
  - 17) Menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
  - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan administrasi surat menyurat, menyelenggarakan kearsipan, pengelolaan barang dan asset, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian Dinas Pariwisata.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Merencanakan sub kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

- 2) Mengoordinasikan pelaksanaan sub kegiatan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 3) Membagi tugas kepada bawahan;
  - 4) Membimbing dan membina pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 5) Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 6) Melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah;
  - 7) Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Dinas;
  - 8) Melaksanakan Administrasi Umum, Tata usaha dan Kehumasan Dinas;
  - 9) Melaksanakan Penatausahaan Arsip Dinamis pada Dinas;
  - 10) Melaksanakan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Dinas;
  - 11) Melaksanakan Administrasi Barang Milik Daerah pada Dinas;
  - 12) Melaksanakan Penyediaan Jasa Penunjang;
  - 13) Melaksanakan Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
  - 14) Menyelenggarakan evaluasi dan penilaian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 15) Melaksanakan pelaporan hasil pelaksanaan kerja di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - 16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata
- a. Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
    - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
    - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
    - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
    - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
      - a. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi,
      - b. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi,
      - c. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi,
      - d. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi.

- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
  - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
  - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata
- a. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
    - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
    - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
    - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
    - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
      - a. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi;
      - b. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi.
    - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
    - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
    - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
    - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Bidang Pengembangan Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan

- perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
    - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan bidang;
    - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
    - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
    - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;
      - a. Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif;
      - b. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
    - 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
    - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
    - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
    - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- a. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas Pariwisata dalam merencanakan dan perumusan program, melaksanakan koordinasi, monitoring, serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
  - b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
    - 1) Menyusun rencana kerja di lingkungan Bidang berdasarkan Rencana Strategis Dinas;
    - 2) Mendistribusikan tugas dan pelaksanaan sub kegiatan kepada bawahan dan kelompok jabatan DI di lingkungan bidang;
    - 3) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
    - 4) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang;
    - 5) Menyelenggarakan, mengendalikan, dan mengevaluasi;

- a. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan;
  - b. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif.
- 6) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan dengan UPTD;
  - 7) Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan teknis dan administratif, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan di lingkungan dinas;
  - 8) Menyelenggarakan pengelolaan kinerja, evaluasi dan pelaporan pada bidang; dan
  - 9) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.1.2.1 Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan pada bagan di atas, potensi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pariwisata saat ini, dimana dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengalaman serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Pemerintah Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Perda No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Banten.

Berdasarkan komposisi dan jumlah Personil Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2024, tergambar sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Komposisi dan Jumlah Personil**

NO	URAIAN	JUMLAH	%
1	Pegawai Negeri Sipil	54	52,43
2	Pramubakti Administrasi	28	27,18
3	Satuan Pengamanan	12	11,65
4	Kebersihan	7	6,80
5	Pengemudi	2	1,94
JUMLAH		103	100,00

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2024*

Komposisi jabatan Pegawai berdasarkan Golongan Ruang Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2024 terdata sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan**

NO.	JABATAN	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	4	4
4	Kepala Subbag	-	-	-	1	1
5	Fungsional	-	-	9	6	15
6	Staf / Pelaksana	-	7	23	2	32
JUMLAH		-	7	32	15	54
% terhadap Jumlah Pegawai		-	12,96	59,26	27,78	100,00

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2024*

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

NO	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN						JUMLAH
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	-	1	-	-	-	1
3	Kepala Bidang/UPT	-	3	1	-	-	-	4
4	Kepala Subbag	-	1	-	-	-	-	1
5	Fungsional	-	10	5	-	-	-	15
6	Staf / Pelaksana	-	4	15	6	-	7	32
7	Pramubakti Administrasi	-	2	12	-	1	13	28
<b>TOTAL</b>		0	21	34	6	1	20	82
<b>% terhadap Jumlah Pegawai</b>		0	0,26	0,41	0,07	0,01	0,244	100

*Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2024*

Jenis pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Teknis yang diikuti pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten sampai dengan tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Jenis Pendidikan dan Latihan Teknis Yang Diikuti 2022 s/d Tahun**  
**2024**

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa	18
2	Diklat Perbendaharaan Keuangan Daerah	2
3	Diklat Penatausahaan Keuangan Daerah	1
4	Diklat Penatausahaan Aset	2
5	Diklat PIM IV	2
6	Diklat Teknis Penyusunan APBD	3
7	Diklat Penyusunan LAKIP	1
8	Diklat Teknis Penyusunan SKP	2
9	Diklat Management Data Pemerintahan Berbasis Spasial (GIS)	1
10	Diklat Pelatihan Teknis Telaahan Staff	1
11	Diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1
12	Diklat Pendidikan dan Pelatihan Etika Pemerintahan	2
13	Diklat Pelatihan Pengelolaan Kepegawaian	2
14	Diklat Tunas Integritas	1
15	Diklat Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli (PNBP)	1
16	Diklat Mengikuti Pelatihan Penyusunan Anjab dan ABK	1
17	Diklat Pelatihan Pengelolaan Kegiatan Bagi PPTK	2
18	Diklat Manajemen Inovasi	3
19	Diklat Manajemen Aset Daerah	1
20	Diklat Penilaian Kompetensi Pegawai	2
21	Diklat Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi dan Evaluasi bagi Pejabat Tinggi Pratama	1
22	Diklat Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1
23	Diklat Orientasi Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Jabfung Pengalihan Administrator dan Pengawasan ke Jabatan Fungsional	3
24	Diklat Manajemen Risiko	2
25	Diklat Pelatihan dan Pengembangan Mindset dan Budaya Kerja Aparatur	1
26	Diklat Pelatihan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1
27	Diklat Penyusunan Proses Bisnis	1
28	Diklat Penyusunan Standard Operasional Pelayanan	3
29	Diklat Tata Kelola APBD (Tata Kelola Keuangan Daerah, Akuntansi dan Perpajakan)	3
30	Diklat Penggunaan Komputer dan Aplikasi Office	3
31	Diklat Revolusi Mental	3
32	Diklat Pengelolaan Kegiatan Bagi Calon PPTK/Pembantu PPTK	1

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH</b>
33	Diklat Pengelolaan Kegiatan Bagi PPTK/Pembantu PPTK	3
34	Diklat Pelatihan TIK , Statistik dan Keamanan Informasi	2
35	Diklat Penataan arsip Digital	5
36	Diklat Pelatihan Peningkatan Kapasitas Diri Team Work dan Problem Solving	1
37	Diklat Pelatihan Analisis Jabatan / Analisis Beban Kerja	2
38	Diklat Penilaian Kompetensi dan Potensi Pegawai	1
39	Diklat Pelatihan Pengelolaan SPIP	3
40	Diklat Pelatihan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	1
41	Diklat Pelatihan Teknis Pengelolaan Informasi Berbasis Media Elektronik	3
42	Diklat Pelatihan dasar Penanggulangan Bencana	1
43	Diklat Pelatihan Penyusunan Standard Operasional Prosedur (SOP)	2
44	Diklat Pelatihan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1
45	Diklat Pelatihan Manajemen Resiko	1
46	Diklat Survei Kepuasan Masyarakat	1
47	Diklat Penggunaan Produk Dalam Negeri bagi PPTK	3
48	Diklat Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1
49	Diklat Pelatihan Terbuka Pengarusutamaan Gender	1
50	Diklat Pelatihan Terbuka Membangun Team Work dan Komunikasi Dalam Organisasi	1
51	Diklat Pelatihan Kompetensi Teknis Kearsipan (PKTK) Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center )	1
52	Diklat Kompetensi Pemerintahan	4
53	Diklat Pelatihan Public Speaking bagi Pejabat Administrator dan Pengawas (Setara)	1
54	Diklat Pelatihan Pengelolaan Data Statistik Sektoral	1
55	Diklat Pelayanan Prima Bagi OPD Penghasil	1
56	Diklat Pelatihan Problem Solving dan Decision Making	1
57	Diklat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	2
58	Diklat Pelatihan Administrasi Keuangan	2
59	Diklat Pelatihan Pranata Komputer	1
60	Pelatihan Perencanaan Perangkat Daerah	2
61	Diklat Analisis Jabatan / Analisis Beban Kerja	3
62	Diklat Manajemen Perkantoran Modern	1
63	Diklat Standar Operating Procedure	1
64	Diklat Publik	1
65	Budaya Kerja berAKHLAK	1
66	Diklat Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah bagi PPK	1

<b>NO</b>	<b>JENIS DIKLAT</b>	<b>JUMLAH</b>
67	Diklat Perpajakan	1
68	Diklat Public Speaking dan Master Ceremony	2
69	Diklat Manajemen Kinerja	1
70	Diklat Manajemen Inovasi Daerah Berbasis Sektor Unggulan	1
71	Bimtek LPPD	1
72	Bimtek Manajemen Kearsipan dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center) di Era Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).	1
73	Bimtek Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif	4
74	Bimtek Pelatihan Kompetensi Teknis (PKTK) Bidang Program Arsip Vital dan Preservasi Arsip Negara / Dokumen Perusahaan	1
75	Bimtek Pelatihan Kompetensi Teknis (PKTK) Penataan Arsip Inaktif yang Efektif dan Efisien	1
<b>JUMLAH</b>		<b>142</b>

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Pariwisata, 2024

Dari Tabel 2.4 terlihat bahwa daya dukung kapasitas pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten melalui pendidikan dan latihan telah mencapai **262.96 %** dari total pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan.

### **2.1.2.2 Sumber daya Sarana dan Prasarana**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Banten, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari aspek kuantitas dan kualitas sampai dengan tahun 2024 sarana prasarana dimaksud meliputi komponen :

1. alat-alat angkutan;
2. alat kantor dan rumah tangga;
3. alat studio dan alat komunikasi;

Dari penjelasan diatas, merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, cakupan ketersediaan sarana prasarana kerja ditujukan bagi sarana prasarana kerja pejabat lingkup Pemerintah Daerah, sehingga rasio ketersediaan sarana prasarana dengan jumlah personil secara keseluruhan memerlukan penambahan baik kualitas maupun kuantitas.

Saat ini sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Banten meliputi berbagai bentuk bendaan seperti tertera pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Daftar Sarana dan Prasarana yang dimiliki**

No	Golongan / Jenis / Nama Barang	Yang Dimiliki Saat Ini		
		Kuantitas / Jumlah (Unit)	Kondisi	Kelayakan
A	Peralatan Dan Mesin			
1	Pompa	1	Baik	Layak
2	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	8	Baik	Layak
3	Kendaraan Bermotor Penumpang	3	Baik	Layak
4	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2	Baik	Layak
5	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	16	Baik	Layak
6	Kendaraan Bermotor Khusus	1	Baik	Layak
7	Perkakas Bengkel Service	2	Baik	Layak
8	Alat Penyimpan Hasil Percobaan Pertanian	1	Baik	Layak
9	Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1	Baik	Layak
10	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	137	Baik	Layak
11	Alat Kantor Lainnya	31	Baik	Layak
12	Meubelair	116	Baik	Layak
13	Alat Pembersih	1	Baik	Layak
14	Alat Pendingin	56	Baik	Layak
15	Alat Dapur	4	Baik	Layak
16	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	72	Baik	Layak
17	Alat Pemadam Kebakaran	10	Baik	Layak
18	Meja Kerja Pejabat	22	Baik	Layak
19	Meja Rapat Pejabat	5	Baik	Layak
20	Kursi Kerja Pejabat	44	Baik	Layak
21	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	3	Baik	Layak
22	Lemari Dan Arsip Pejabat	14	Baik	Layak
23	Peralatan Studio Audio	8	Baik	Layak
24	Peralatan Studio Video Dan Film	32	Baik	Layak
25	Peralatan Studio Gambar	4	Baik	Layak
26	Peralatan Cetak	4	Baik	Layak
27	Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	2	Baik	Layak
28	Alat-Alat Sandi	5	Baik	Layak

No	Golongan / Jenis / Nama Barang	Yang Dimiliki Saat Ini		
		Kuantitas / Jumlah (Unit)	Kondisi	Kelayakan
29	Alat Laboratorium Proses Teknologi Tekstil	9	Baik	Layak
30	Photo And Film Equipment	1	Baik	Layak
31	Senjata Lain-Lain	3	Baik	Layak
32	Alat Dalmas/Alat Dakhura	2	Baik	Layak
33	Peralatan Deteksi Intel	2	Baik	Layak
34	Alsus Fotografi Kepolisian	3	Baik	Layak
35	Instrumen Analisis Laboratorium Forensik	1	Baik	Layak
36	Personal Komputer	83	Baik	Layak
37	Peralatan Personal Komputer	36	Baik	Layak
38	Peralatan Jaringan	1	Baik	Layak
39	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik	Layak
40	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1	Baik	Layak
41	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1	Baik	Layak
42	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1	Baik	Layak
43	Bangunan Parkir	4	Baik	Layak
44	Taman	1	Baik	Layak
45	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	2	Baik	Layak
46	Buku Ilmu Sosial	47	Baik	Layak
47	Lukisan Dan Ukiran	2	Baik	Layak
48	Software	2	Baik	Layak
49	Aset Lain - Lain	4	Baik	Layak
Total		812		

Sumber : ATISISBADA Provinsi Banten Tahun 2024

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, sebagaimana tertuang dalam tugas pokok, fungsi rincian tugas dan tata kerja adalah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata meliputi meliputi Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Pemasaran Pariwisata, Bidang Pengembangan Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, Bidang Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.1.3.1 Capaian indikator Kinerja

Capaian kinerja pelaksanaan kewenangan Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2023 - 2026 melalui: (1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. (2) Program Pemasaran Pariwisata, (3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, (4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta (5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi berdasarkan pengukuran yang mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya yang terdapat dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023-2026 adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan tahun 2024 adalah sebesar 22.465.192 orang dari target sebesar 21.063.968 :
2. dan Indikator Kinerja kunci (IKK) adalah Capaian Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) berikut;
  - a. Akuntabilitas Kinerja OPD  
Capaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) OPD pada tahun 2024 adalah BB.
  - a. Jumlah Kunjungan Wisatawan  
Jumlah Kunjungan Wisatawan dalam hal ini adalah Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Asing. Indikator ini digunakan untuk mengukur Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Tahun berjalan tahun 2024 adalah 22.465.192 orang, Dampak yang dirasakan bagi masyarakat di sekitar objek wisata adalah meningkatnya perekonomian.
  - b. Rata – rata lama inap  
Berdasarkan data BPS RI dijelaskan bahwa, rata-rata lama inap wisatawan pada tahun 2024 pada akomodasi berbintang dan non bintang mencapai 1,37 hari, Dampak yang dirasakan bagi masyarakat di sekitar objek wisata adalah meningkatnya perekonomian.
  - c. Rata – rata pengeluaran wisatawan  
Berdasarkan data NESPADA Dinas Pariwisata 2024 dijelaskan bahwa, Realisasi rata-rata pengeluaran wisatawan pada tahun 2024 Wisatawan sebesar Rp. 3.172.274,- Dampak yang dirasakan bagi masyarakat di sekitar objek wisata adalah meningkatnya perekonomian.
  - d. Jumlah SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif  
Jumlah Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang terlatih setiap tahunnya di tetapkan 600 orang dari target sampai dengan berakhirnya renstra 2023 – 2026. Dampak yang dirasakan bagi masyarakat yang mendapatkan pelatihan adalah meningkatnya perekonomian.
  - e. Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan;

- 1) Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan perangkat daerah, dari yang direncanakan sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100 %;
- 2) Persentase Sarana Prasarana Perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi administrasi perangkat daerah, yang direncanakan sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100 %;
- 3) Persentase terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, yang direncanakan sebesar 100 %, terealisasi sebesar 100%;
- 4) Persentase terwujudnya akuntabilitas penata usaha keuangan yang mendukung yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD, yang direncanakan sebesar 100%, terealisasi sebesar 100%;

**Tabel 2.6**  
**Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Periode 2023 - 2026**

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET RENSTRA DINAS PARIWISATA				REALISASI CAPAIAN TAHUN KE				RASIO CAPAIAN TAHUN KE			
	SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	NSPK / SPM	IKU	INDIKATOR LAINNYA	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Capaian SAKIP (satuan : nilai)		v		BB	BB	BB	BB	A	BB			A	BB		
2	Persentase Kunjungan Jumlah Wisatawan (Satuan : Persen)			v	20.060.922	21.063.968	22.117.167	23.223.025	25.664.013	22.465.192			127,93	106,65		
3	Rata-Rata Lama inap ( satuan : Hari )			v	1,66	1,72	1,78	1,84	1,51	1,37			91,11	79,65		
4	Rata-Rata Pengeluaran Wisatawan ( satuan : Rp )			v	4.998.799	5.248.739	5.511.176	5.786.735	2.347.107	3.172.274			46,95	60,44		
5	Persentase SDM yang memiliki Sertifikat di Sektor Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif (satuan : persen)			v	600	600	600	600	2.265	2.553			377,50	425,50		

Sumber Data : Dinas Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten yang membidangi fungsi pariwisata

Dari gambaran capaian kinerja diatas, terindikasi beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Faktor-faktor tersebut meliputi belum optimal dan belum efektifnya :

1. Inventarisasi dan pengembangan keragaman daya tarik destinasi dan wisata banten,
2. Dukungan fasilitas dan amenities destinasi wisata;
3. Aksesibilitas pasar terhadap destinasi;
4. Peningkatan intensifikasi dan diversifikasi usaha pariwisata;
5. Komprehensifnya destinasi wisata yang marketable;
6. Fasilitasi penyelesaian kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota terhadap keberadaan destinasi wisata;
7. Fasilitasi peningkatan konektivitas antar destinasi wisata;
8. Fasilitasi peningkatan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif baik di dalam kawasan destinasi maupun diluar kawasan destinasi wisata;
9. Sistem publikasi dan promosi pariwisata;
10. Peran usaha pariwisata dan ekonomi kreatif di dalam dan atau luar lokasi destinasi wisata;
11. Fasilitasi peningkatan harmonisasi dan keterpaduan pembangunan pariwisata;
12. Peran dan partisipasi usaha pariwisata dalam hal kompetensi dan standarisasi usaha pariwisatanya;
13. Fasilitasi penguatan dan pengembangan kemitraan antar pemerintah daerah, pelaku usaha pariwisata dan swasta;
14. Peran dan partisipasi lembaga dan kelembagaan pariwisata;
15. Belum optimalnya dukungan manajemen sumber daya aparatur.
16. Keterbatasan dan kurang efektifitasnya penggunaan anggaran;
17. Belum optimalnya ketersediaan, data dan informasi yang berkualitas, intepretatif, mutakhir dan berkesinambungan;

Berdasarkan data Kunjungan Wisatawan periode 2020-2024 yang bersumber dari SIMPARDA Dinas Pariwisata Provinsi Banten, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara. Tabel berikut menampilkan kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara:

**Tabel 2.7**  
**Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Banten, 2020 – 2024**

Tahun	Wisatawan		Jumlah
	M mancanegara	Domestic	
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	37.946	22.384.023	22.421.969
2021	185.759	10.457.707	10.643.466
2022	290.161	20.003.431	20.293.592
2023	314.755	25.349.258	25.664.013
2024	367.841	22.097.351	22.465.192

*Sumber Data Simparda Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2024*

Dalam rangka mendukung kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara ke Banten, sarana pendukung berupa usaha restaurant, rumah makan, dan cafe hotel bintang dan non bintang, usaha perjalanan pariwisata, dan sarana rekreasi serta hiburan di Banten. Selain itu, regulasi terkait pariwisata juga semakin mudah, murah, cepat dan mendorong investasi.

Prioritas pembangunan bidang pariwisata yang berkaitan dengan SDM, diarahkan pada pemantapan kinerja pemangku kepentingan pariwisata Provinsi Banten, melalui upaya-upaya pengembangan kelembagaan pariwisata dan penataan destinasi pariwisata serta penciptaan daya tarik wisatawan baik domestik maupun asing.

Provinsi Banten memiliki destinasi pariwisata yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Destinasi-destinasi ini mencakup berbagai kategori, seperti wisata alam, budaya, sejarah, dan kuliner, yang menawarkan pengalaman beragam bagi wisatawan. Beberapa destinasi wisata populer di Banten antara lain Pantai Anyer, Taman Nasional Ujung Kulon, dan Desa Wisata Suku Baduy.

Tabel berikut menampilkan jumlah destinasi pariwisata yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten:

**Tabel 2.8**  
**Jumlah Data Per Kategori Pariwisata Daerah Provinsi Banten Tahun 2024**

No	Kabupaten/Kota	Wisata Buatan	Wisata Alam	Wisata Budaya	Lain-lain	Minat Khusus	Wisata Religi	Total
1	Kabupaten Lebak	9	25	4	2	1	2	43
2	Kabupaten Pandeglang	25	74	24	0	0	68	191

3	Kabupaten Serang	12	37	2	7	10	4	72
4	Kabupaten Tangerang	5	26	0	6	4	3	44
5	Kota Cilegon	5	2	0	0	3	1	11
6	Kota Serang	4	15	3	0	18	1	41
7	Kota Tangerang	13	5	0	2	0	1	21
8	Kota Tangerang Selatan	24	0	1	19	3	13	60
<b>TOTAL</b>		<b>97</b>	<b>184</b>	<b>34</b>	<b>36</b>	<b>39</b>	<b>93</b>	<b>483</b>

Sumber : <http://simparda.bantenprov.go.id>

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten maka untuk mendukung pembangunan di bidang urusan Pariwisata dirumuskan dalam program dan Anggaran Dinas Pariwisata Tahun 2023-2026 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut;

**Tabel 2.9**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten**  
**Tahun 2023 – 2026**

Uraian	ANGGARAN				REALISASI ANGGARAN				RASIO ANGGARAN				RATA-RATA PERTUMBUHAN			
	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	7	8	9	10	12	13	14	15	17	18	19	20
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.385.934.300	19.947.612.900	19.728.800.390		18.309.024.858	19.135.337.343			94,44	96			94,44	95,93		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	19.631.115.200	20.739.843.200	11.309.227.800		19.041.349.922	20.044.349.055			97,00	97			97,00	96,65		
Program Pemasaran Pariwisata	4.582.925.100	5.988.124.377	6.537.387.500		4.465.793.027	5.879.272.035			97,44	98			97,44	98,18		
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	1.940.584.000	1.400.000.000	1.273.502.000		1.788.573.675	1.249.975.920			92,17	89			92,17	89,28		
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	3.725.617.900	2.504.700.000	2.690.420.000		3.399.170.325	2.400.946.079			91,24	96			91,24	95,86		
<b>Total</b>	<b>49.266.176.500</b>	<b>50.580.280.477</b>	<b>41.539.337.690</b>	<b>-</b>	<b>47.003.911.807</b>	<b>48.709.880.432</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,41</b>	<b>476</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>95,41</b>	<b>96,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Capaian realisasi, Anggaran tahun 2023 Rp. 49.226.176.500 dan realisasi anggaran Rp. 47.003.911.807, Anggaran tahun 2024 Rp. 50.580.280.477 dan realisasi anggaran Rp. 48.709.880.432

### **2.1.3.2 Tantangan dan Peluang pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata**

Dalam perkembangan dan kemajuan Provinsi Banten, Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki peran strategis sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berkontribusi besar pada peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten khususnya di bidang Pariwisata, untuk itu sudah selayaknya Dinas Pariwisata Provinsi Banten memiliki strategi guna pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Terkait hal tersebut strategi pengidentifikasian faktor internal dan eksternal yang tertuang dalam Analisa SWOT diperlukan Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai upaya dalam me-roadmap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten

#### **1. Identifikasi Faktor Internal**

Identifikasi faktor internal merupakan analisa lingkungan internal sekitar Dinas Pariwisata terdiri dari variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada dalam organisasi, tetapi umumnya tidak bisa mengontrol jangka pendek dari manajemen. Berdasarkan identifikasi faktor- faktor internal yang menjadi kekuatan serta kelemahan dalam Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Banten dapat dijabarkan sebagai berikut:

##### **a. Kekuatan (strengths)**

Kekuatan yaitu kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Adapun yang menjadi kekuatan dalam pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, diantaranya:

- 1) Kekayaan dan keragaman destinasi wisata ( pantai, gunung, arung jeram, budaya )
- 2) Keragaman produk ekonomi kreatif
- 3) Ketersediaan Sumberdaya manusia (Pelaku Ekonomi Kreatif )
- 4) Daya dukung wilayah yang strategis
- 5) Dukungan kebijakan (Pusat, Provinsi )

##### **b. Kelemahan (Weaknesses)**

Kelemahan adalah keterbatasan dalam hal sumber daya, kemampuan dan keterampilan yang menjadi hambatan serius bagi pengembangan kinerja organisasi. adapun yang menjadi kelemahan Dinas Pariwisata Provinsi Banten, diantaranya:

- 1) Masih rendahnya daya saing destinasi wisata
- 2) Belum optimalnya pemasaran pariwisata
- 3) Ruang kreatif belum tersedia secara optimal bagi pelaku ekonomi kreatif

4) Masih rendahnya kompetensi SDM pariwisata

2. Identifikasi Faktor Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel (peluang dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus dalam kontrol jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel ini dalam keadaan dimana organisasi ini hidup. Adapun yang menjadi peluang dan ancaman Dinas Pariwisata Provinsi Banten yaitu sebagai berikut:

A. Peluang (Opportunities)

Peluang yaitu kondisi penting yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, maka adapun yang menjadi peluang dalam pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, yaitu:

- 1) Meningkatnya Kunjungan Wisata
- 2) Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi lokal
- 3) Meningkatnya penyerapan tenaga kerja
- 4) Menurunnya tingkat kemiskinan
- 5) Meningkatnya pendapatan daerah

B. Ancaman (Threat)

Ancaman yaitu kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan dari sebuah organisasi dan jika tidak segera diatasi maka akan menjadi bahaya bagi sebuah organisasi di masa depan. Berdasarkan hasil analisa, maka yang menjadi ancaman dalam pelaksanaan strategi Dinas Pariwisata Provinsi Banten, diantaranya:

- 1) Pertumbuhan ekonomi lambat
- 2) Income parkapita masyarakat rendah
- 3) Masuknya Produk ekonomi kreatif dari luar daerah.
- 4) Menurunnya omzet penjualan produk barang/ jasa di wilayah sekitar destinasi.
- 5) Meningkatnya pengangguran
- 6) Meningkatnya kemiskinan.
- 7) Menurunnya pendapatan daerah

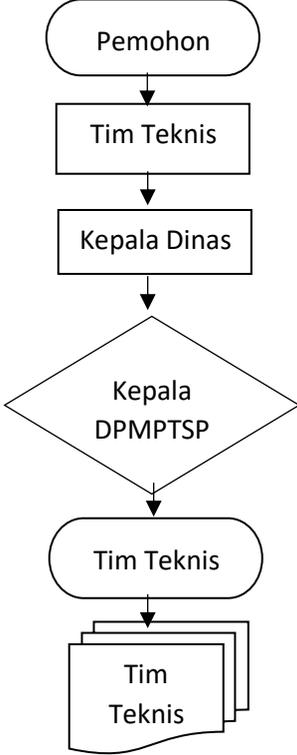
<b>Analisa Faktor Internal</b>	<p><b><u>Strengths (Kekuatan)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekayaan dan keragaman destinasi wisata ( pantai, gunung, arung jeram, budaya )</li> <li>2. Keragaman produk ekonomi kreatif</li> <li>3. Ketersediaan Sumberdaya manusia ( Pelaku Ekonomi Kreatif )</li> <li>4. Daya dukung wilayah yang strategis</li> <li>5. Dukungan kebijakan (Pusat, Provinsi )</li> </ol>	<p><b><u>Weaknesses (Kelemahan)</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masih rendahnya daya saing destinasi wisata</li> <li>2. Masih rendshnya kompetensi SDM pariwisata</li> <li>3. Ruang kreatif belum tersedia secara optimal bagi pelaku ekonomi kreatif</li> <li>4. Belum optimal pemasaran pariwisata</li> </ol>
<b>Analisa Faktor Eksternal</b>		

<p><b>Opportunities (Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Kunjungan Wisata</li> <li>2. Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi lokal</li> <li>3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja</li> <li>4. Menurunnya tingkat kemiskinan</li> <li>5. Meningkatnya pendapatan daerah</li> </ol>	<p><b>Analisa Strategi (SO)</b> (kekuatan vs peluang) Menggunakan kekuatan untuk meraih peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promosi destinasi berbasis digital</li> <li>2. Promosi destinasi wisata berbasis komunitas</li> <li>3. Penguatan kemitraan dengan pengusaha perjalanan wisata.</li> </ol>	<p><b>Analisa Strategi (WO)</b> (kelemahan vs peluang) Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan penataan destinasi wisata ( Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas</li> <li>2. Pengembangan skill pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif</li> <li>3. Pembangunan ruang kreatif</li> <li>4. Pengembangan design materi promosi / pemasaran pariwisata ( Destinasi dan Ekraf )</li> </ol>
<p><b>Threats (Ancaman)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertumbuhan ekonomi lambat</li> <li>2. Income parkapita masyarakat rendah</li> <li>3. Masuknya Produk ekonomi kreatif dari luar daerah.</li> <li>4. Menurunnya omzet penjualan produk barang/ jasa di wilayah sekitar destinasi.</li> <li>5. Meningkatnya pengangguran</li> <li>6. Meningkatnya kemiskinan.</li> <li>7. Menurunnya pendapatan daerah.</li> </ol>	<p><b>Analisa Strategi (ST)</b> (kekuatan vs ancaman) Menggunakan kekuatan untuk menghadapi ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/penyediaan tempat pemasaran produk ekonomi kreatif di destinasi wisata</li> <li>2. Pembangunan aksesibilitas, Amenitas dan atraksi wisata</li> <li>3. Advokasi sadar wisata</li> </ol>	<p><b>Analisa Strategi (WT)</b> (kelemahan vs ancaman) Mengurangi kelemahan dan menghindari ancaman)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus dan lokus peningkatan daya saing destinasi wisata</li> <li>2. Promosi wisata berdasarkan segmen pasar wisata</li> <li>3. Memfasilitasi akses pemasaran bagi pelaku usaha ekonomi kreatif</li> </ol>

### 2.1.3.3 Standar Pelayanan Minimal Dinas Pariwisata

#### **STANDAR PELAYANAN PENETAPAN VERIFIKASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>b. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pariwisata</li> </ol>
2	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengguna layanna menyampaikan surat permohonan ditujukan ke alamat : Dinas Pariwisata Provinsi Banten  Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Jl. Syech Nawawi, Kec. Curug - Kota Serang atau melalui laman <a href="https://dispar.bantenprov.go.id">https://dispar.bantenprov.go.id</a> , Pos-el: <a href="mailto:dispar@bantenprov.go.id">dispar@bantenprov.go.id</a></li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		b. Pengguna layanan datang langsung ke Dinas Pariwisata Provinsi Banten
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD     A([Pemohon]) --&gt; B[Tim Teknis]     B --&gt; C[Kepala Dinas]     C --&gt; D{Kepala DPMPTSP}     D --&gt; E([Tim Teknis])     E --&gt; F[Tim Teknis]   </pre> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon, Mengajukan permohonan perizinan berusaha sektor pariwisata menggunakan sistem OSS kepada Kepala Dinas melalui Tim Teknis.</li> <li>2. Tim Teknis, Menerima, mencatat dan memverifikasi permohonan perizinan berusaha sektor pariwisata melalui Sistem OSS serta kelengkapan dokumen yang diperlukan. Jika dokumen lengkap maka disusun konsep Rekomendasi Teknis izin Usaha Pariwisata untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif. Jika dokumen tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon.</li> <li>3. Kepala Dinas, Menerima Konsep Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pariwisata. Jika setuju konsep diparaf untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas. Jika tidak setuju konsep</li> </ol>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>dikembalikan kepada tim teknis untuk diperbaiki.</p> <p>4. Kepala DPMPTSP, Menerima Konsep Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pariwisata. Jika setuju konsep ditandatangani untuk selanjutnyadiseraahkan kepada Tim Teknis. Jika tidak setuju konsep dikembalikan kepada Kepala Bidang Industri dan Ekonomi Kreatif untuk diperbaiki.</p> <p>5. Tim Teknis, Memberikan nomor pada Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pariwisata dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala DPMPTSP.</p> <p>6. Tim Teknis, Menerima Rekomendasi Teknis Izin Usaha Pariwisata.</p>
4	Jangka Waktu	<p>a. Informasi disampaikan maskimal 3 hari sejak surat permohonan diterima</p> <p>b. Jika pengguna layanan datang langsung maka diarahkan kepada petugas yang memberikan penetapan verifikasi online single submission (OSS) maksimal 2 (dua) jam setelah menyampaikan informasi</p>
5	Biaya	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	Makalah disertai dengan Penunjukdan/ Penugasan narasumber yang akan menyampaikan materi paparan atau makalah
7	Sarana, Prasarana dan/ Fasilitas	<p>a. Ruang Tamu ber-AC, meja, kursi tamu</p> <p>b. Komputer dengan akses internet</p> <p>c. Printer</p> <p>d. Pesawat Telepon</p>
8	Kompetensi Pelaksana	a. SDM yang memiliki pengetahuan di bidang program-program kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali
9	Pengawasan Internal	a. Supervisi Atasan langsung.

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>b. Dilakukan pengawasan internal oleh Inspektorat.</p> <p>c. Dilaksanakan secara kontinyu dan berkelanjutan</p>
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>a. Email : <a href="mailto:Infotourism@baliprov.go.id">Infotourism@baliprov.go.id</a></p> <p>b. Website Dinas Pariwisata Provinsi Bali (<a href="mailto:disparda@baliprov.go.id">disparda@baliprov.go.id</a>).</p> <p>c. SP4N LAPOR</p>
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 2 orang petugas pada setiap Bagian
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan narasumber diberikan secara lengkap, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
13	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan narasumber yang diberikan dijamin keabsahannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

#### 2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten mencakup berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sektor pariwisata. Berikut adalah kelompok sasaran utama yang menjadi fokus perhatian Dinas Pariwisata Banten:

##### 1. Pelaku Usaha Pariwisata

Dinas Pariwisata Provinsi Banten memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha di sektor pariwisata, seperti pengelola objek wisata, pelaku usaha kuliner, dan penyedia jasa wisata lainnya. Program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment) telah diberikan kepada usaha pariwisata untuk memastikan standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan ramah lingkungan di destinasi wisata.

##### 2. Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata

Dinas Pariwisata juga fokus pada peningkatan kapasitas SDM di bidang pariwisata. Melalui pelatihan dan sertifikasi, seperti untuk pemandu wisata, penyelamat wisata tirta (Balawista), dan pelaku usaha kuliner, diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan profesionalisme dalam industri pariwisata.

### 3. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

Pokdarwis merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi wisata berbasis komunitas. Dinas Pariwisata Provinsi Banten aktif dalam membina dan memberdayakan Pokdarwis untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata.

### 4. Masyarakat Lokal dan UMKM

Masyarakat lokal, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi sasaran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata. Dinas Pariwisata Provinsi Banten mendukung mereka melalui pelatihan, pameran produk kreatif, dan lomba-lomba yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.

### 5. Wisatawan Domestik

Wisatawan domestik menjadi target utama dalam promosi dan pengembangan destinasi wisata di Banten. Melalui portal informasi seperti [excitingbanten.id](http://excitingbanten.id), Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyediakan informasi terkini mengenai destinasi wisata, acara, dan produk lokal untuk menarik minat wisatawan domestik.

Dengan melibatkan berbagai kelompok sasaran ini, Dinas Pariwisata Provinsi Banten berupaya untuk menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

### **2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah**

Pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat direncanakan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien manakala dibarengi dengan pemahaman terhadap kondisi atau aspek-aspek yang mempengaruhi keberhasilan rencana pembangunan tersebut. Kondisi atau aspek yang dampaknya signifikan, perlu dirumuskan menjadi isu strategis dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan. Hal ini diperlukan dalam rangka mengantisipasi adanya kegagalan atau kelemahan yang menimbulkan kerugian lebih besar serta pemanfaatan adanya peluang secara optimal. Pasal 1 Permendagri No. 86 Tahun 2017 mendefinisikan permasalahan pembangunan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian

yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau bisa juga tidak dimanfaatkan, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Pada Bab ini, akan dijelaskan isu-isu strategis berdasarkan permasalahan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Provinsi Banten beserta unit-unit kerja dibawahnya. Penelaahan dan penentuan isu-isu strategis dilakukan berdasarkan sistematika berikut ini;

#### 1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan pariwisata Provinsi dibatasi oleh urusan Pemerintahan Provinsi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah di Indonesia. Undang-Undang ini bertujuan untuk meningkatkan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan desentralisasi yang lebih baik serta memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Permasalahan pariwisata akan muncul berdasarkan urusan pemerintahan Provinsi. Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata muncul dari belum optimalnya penyelesaian dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Tujuan dari perumusan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pariwisata adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja.:

Permasalahan utama pada urusan Pariwisata adalah Belum optimalnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang disebabkan, antara lain oleh :

- Terbatasnya Perkembangan Destinasi Wisata
- Rendahnya Daya Saing Destinasi Wisata
- Rendahnya Daya Saing Produk Ekonomi Kreatif
- Rendahnya Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekraf
- Rendahnya Kunjungan Wisatawan
- Belum Optimalnya sosialisasi dan promosi tentang pariwisata di Provinsi Banten
- Belum adanya destinasi wisata milik Provinsi
- Belum tersedianya Sarana Prasarana Kota Kreatif
- Kurangnya Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang memiliki Sertifikat Tingkat Lanjutan.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan OPD pada BAB II, memiliki masalah pokok yakni “Belum Optimalnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah” yang diakibatkan oleh masalah yakni “Belum Optimalnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif” dalam

pelaksanaan pembangunan pariwisata yang akar masalahnya dapat dirumuskan antara lain:

1. Belum Optimalnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata
2. Minimnya Sarana dan Prasarana peningkatan produk ekonomi kreatif
3. Belum Optimalnya Promosi Pariwisata yang menarik wisatawan
4. Terbatasnya SDM Pariwisata dan Ekraf yang bersertifikat

## 2. Telaahan Visi, Misi, RPJPD

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten tahun 2025–2029, maka visi dan misi RPJMD, sebagaimana Provinsi Banten tahun 2025–2029 adalah:

### **“BANTEN MAJU, ADIL, MERATA, TIDAK KORUPSI”**

Sementara itu misi Provinsi Banten periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Berintegritas
2. Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berintegritas, Berdaya Saing, Berkualitas, Inovatif, dan Tidak Diskriminatif
4. Akselerasi Pembangunan Wilayah melalui Infrastruktur yang Merata, Manusiawi, Terintegrasi dengan Ekonomi Domestik dan Global berdasarkan kesesuaian Tata Ruang
5. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta Resiliensi terhadap Bencana

Berdasarkan pada visi dan misi RPJMD Provinsi Banten 2025-2026, maka Dinas Pariwisata mendukung pelaksanaan misi tersebut (khususnya misi ke dua) sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Provinsi Banten. Selanjutnya dari Misi yang telah dipilih tersebut, maka Dinas Pariwisata Provinsi Banten menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

**Tabel 2.10**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi RPJPD**

<b>BANTEN MAJU, ADIL, MERATA, TIDAK KORUPSI</b>		
<b>MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL</b>		
Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<b>Belum Optimalnya</b>	obyek wisata yang kurang/tidak	kebijakan dan fasilitasi peningkatan nilai tambah

<b>BANTEN MAJU, ADIL, MERATA, TIDAK KORUPSI</b>		
<b>MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL</b>		
Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<b>Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata</b>	memiliki daya tarik/unik dari obyek wisata di daerah lain.	destinasi dengan amenities, fasilitas, dan atraksi yang aksesable
	obyek wisata yang menarik dan unik umumnya memiliki skala jangkauan yang kecil.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan keragaman daya tarik melalui atraksi atau rekayasa kebijakan yang aksesable
	daya saing dan nilai obyek wisata yang lemah	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
	pengelola destinasi yang belum profesional	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
	belum lengkapnya fasilitas dan amenities yang ada di daerah destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
	kurang optimalnya ketersediaan dan kelayakan fasilitas aksesibilitas menuju destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
	ketidakefektifan berbagai regulasi yang menghambat pengembangan destinasi dengan dasar pembagian kewenangan atas urusan dan anggaran	kebijakan dan fasilitas usulan yang bottom up dan lintas sektor untuk mengeliminasi masalah pembagian urusan dan anggaran
	<b>Belum Optimalnya Promosi Pariwisata yang</b>	Pemasaran dan atau promosi pariwisata yang diikuti skala internasional, nasional, regional, dan lokal lebih bersifat temporer,

<b>BANTEN MAJU, ADIL, MERATA, TIDAK KORUPSI</b>		
<b>MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL</b>		
Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
<b>menarik wisatawan</b>	bukan bersifat sistemik	
	keterbatasan materi pemasaran dan promosi pariwisata yang belum tepat sasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi melalui KKL yang bersifat vertikal dan horizotal dengan pelibatan para pihak terkait
	Keterbatasan media pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif	kebijakan dan fasilitasi seleksi media yang efektif dan efisien
	keterbatasan informasi sasaran dan target pemasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi dan media promosi melalui pelibatan para pihak terkait yang bersifat vertikal dan horizotal.
<b>Minimnya Sarana dan Prasarana peningkatan produk ekonomi kreatif</b>	belum tersedianya roadmap ekonomi kreatif banten yang detail sebagai pemicu kreatifitas publik	kebijakan dan fasilitasi pembangunan roadmap ekonomi kreatif banten yang komprehensif, komunikatif, dan bertanggung jawab
	belum kompetitifnya dunia usaha ekonomi kreatif karena kelemahan data, informasi, dan publikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya motif ekonomis dan aktivitas kompetisi melalui berbagai forum secara proposional
	belum tersedianya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan kemajuan ekonomi kreatif	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif
	belum optimalnya partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam upaya peningkatan daya	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya event yang bersifat lomba dan kompetisi

<b>BANTEN MAJU, ADIL, MERATA, TIDAK KORUPSI</b>		
<b>MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL</b>		
Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
	Penghambat	Pendorong
	saing seperti sertifikasi	
<b>Terbatasnya SDM Pariwisata dan Ekraf yang bersertifikat</b>	belum adanya arah kebijakan pengembangan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif sebagai pengembangan potensi masyarakat, khususnya di sekitar destinasi	kebijakan dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif
	homogenitas masyarakat di kawasan destinasi mengakibatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial yang lambat	kebijakan dan fasilitasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial sebagai entry point pengembangan sumberdaya manusia

Keterangan : Dinas Pariwisata Banten tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa fokus utama dari telaahan visi dan misi Provinsi Banten adalah **Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan Potensial**, dimana dapat diinterpretasikan bahwa urusan pariwisata merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk **meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi (gini rasio) dan pemerataan ekonomi (aksesibilitas ekonomi produktif)**, namun demikian perlu diperhatikan juga, bahwa dalam mengejawantahkan amanah tersebut, Dinas Pariwisata Provinsi Banten dibatasi ruang lingkup kewenangan yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014, yaitu meliputi sub urusan destinasi, pemasaran, ekonomi kreatif, dan sumberdaya manusia.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam mendukung keberhasilan visi tersebut adalah :

1. Misi Kedua adalah **Mendorong Kemajuan Ekonomi secara Inklusif melalui Penguatan Sektor Kreatif, Unggulan, dan**

**Potensial** yang memiliki tujuan 'Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal dengan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Misi Kesatu adalah **Mewujudkan Masyarakat Bermoral Pancasila dan Demokratis Berlandaskan Iman dan Taqwa melalui Reformasi Birokrasi yang Adaptif dan Berintegritas** yang memiliki tujuan Terwujudnya birokrasi yang Berintegritas, Adaptif, Profesional dan Tangguh.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, fungsi Dinas Pariwisata berada kedalam Urusan Pilihan Bukan Pelayanan Dasar, memiliki 5 (lima) Program yaitu:

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
  2. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
  3. Pemasaran Pariwisata
  4. Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
  5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Telaahan Renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

### 3.1. Renstra Kementerian Pariwisata

#### 3.1.1 Arah Kebijakan Kementerian Pariwisata

Dalam rangka perwujudan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Arah Kebijakan menyatakan bahwa arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk itu dibentuklah arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/ sasaran strategis Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029. Arah kebijakan Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 terbagi menjadi lima ruang lingkup utama yaitu:

1. Pengembangan Produk Pariwisata yang adaptif, sinergis, dan berkualitas
2. Pengembangan SDM Pariwisata yang unggul dan berdaya saing
3. Pengembangan pariwisata yang menjunjung keberlanjutan dan keadilan sosial

4. Kolaborasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan pariwisata
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kementerian Pariwisata yang baik dan bersih

Dalam periode 2025-2029, Kementerian Pariwisata memiliki lima arah kebijakan utama yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Indonesia. Setiap arah kebijakan diiringi dengan strategi spesifik, melibatkan unit pelaksana, serta relevansi terhadap sasaran strategis dan kerja sama dengan instansi pemerintah terkait. Unit pelaksana utama di dalam Kementerian Pariwisata bertanggung jawab untuk menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan searah dengan arah kebijakan sehingga dapat mencapai sasaran strategis kementerian. Setiap arah kebijakan mengedepankan kolaborasi intraorganisasional di dalam internal Kementerian Pariwisata maupun dengan lintas Kementerian/Lembaga terkait. Arah kebijakan Kementerian Pariwisata juga mendorong kolaborasi intra-organisasional dengan organisasi lainnya baik sektor privat, lembaga non profit, perguruan tinggi dan masyarakat. Berikut penjelasan detail lima arah kebijakan Kementerian Pariwisata 2025-2029:

**Tabel 2.11**  
**Tabel Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata**

<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi Kementerian</b>
Pengembangan Produk Pariwisata yang adaptif, sinergis, dan berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyusunan kajian dan kebijakan yang mendorong pengembangan produk pariwisata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Standarisasi destinasi sesuai standar nasional dan internasional untuk memenuhi destinasi yang atraktif, berkualitas, dan, berkelanjutan dan mengadopsi perkembangan teknologi</li> <li>● Mendorong standarisasi dan sertifikasi usaha</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prioritas pemasaran berbasis digital terutama untuk 14 destinasi prioritas nasional</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Diversifikasi produk pariwisata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kualitas penyelenggaraan event dan MICE</li> </ul>
Pengembangan SDM Pariwisata yang unggul dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kapasitas tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan vokasi dan</li> </ul>

<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Strategi Kementerian</b>
berdaya saing	meningkatkan peran Poltekpar dalam mengembangkan SDM Pariwisata serta pengembangan standar dan perangkat uji kompetensi
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelaku kreatif serta inkubasi produk berbasis riset</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan kompetensi digital pelaku pariwisata</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku pariwisata</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan pariwisata yang menjunjung keberlanjutan dan keadilan sosial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengembangan produk pariwisata dengan menjaga kelestarian alam dan nilai-nilai sosial budaya</li> <li>● Peningkatan pengembangan produk pariwisata berbasis konservasi lingkungan, menjaga kearifan lokal, memperkenalkan warisan budaya, ilmu pengetahuan/dan atau teknol</li> <li>● Pemberian kesempatan yang sama bagi seluruh kelompok usia dari berbagai gender, ras, agama, etnis, dan usia untuk ikut terlibat sebagai pelaku pariwisata dalam kompetisi yang sehat</li> <li>● Pengembangan sektor pariwisata berbasis risiko/ketahanan dalam menghadapi potensi bencana</li> </ul>
Kolaborasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelibatan Masyarakat Lokal dalam mendukung produktivitas pariwisata</li> <li>● Koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pengelolaan destinasi pariwisata yang unggul</li> </ul>
	Kemitraan strategis dalam pemasaran baik pada level nasional dan internasional

Arah Kebijakan	Strategi Kementerian
	Kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas/lembaga riset dan institusi pendidikan untuk melakukan riset pengembangan produk pariwisata
Mewujudkan tata kelola pemerintahan Kementerian Pariwisata yang baik dan bersih	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adopsi teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan efisiensi dan meningkatkan capaian indeks SPBE</li> <li>● Peningkatan standar kualitas pelayanan</li> <li>● Pembangunan budaya kinerja, budaya risiko, dan budaya inovasi</li> <li>● Pembangunan model tata kelola platform dalam pelaksanaan tugas</li> </ul>

Keterangan: Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025 – 2029

### 3.1.2 Target Kinerja

Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk kontribusi dalam memperkuat transformasi ekonomi Indonesia. Transformasi ekonomi tersebut melalui pertumbuhan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk menjadikan Indonesia sebagai Destinasi Unggulan Dunia yang Berkelanjutan dan Bernilai Tambah yang Tinggi. Sehubungan dengan komitmen dan tujuan tersebut, terdapat tujuh indikator sebagai penyumbang data makro untuk target kinerja Kementerian Pariwisata yang tercantum pada Renstra 2024 - 2029. Matriks kinerja dari Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), dan Sasaran Kegiatan (SK)

**Tabel 2.12**  
**Target Kinerja Kementerian Pariwisata**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target RKP 2025	Target 2029
SS1 Meningkatnya kapabilitas sistem kepariwisataan	Indeks Pembangunan Pariwisata (Peringkat <i>Travel and Tourism Development Index</i> )	Peringkat	22	22	<b>20</b>
	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Juta Orang	25,14	25,75	<b>29</b>

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Satuan</b>	<b>Capaian 2024</b>	<b>Target RKP 2025</b>	<b>Target 2029</b>
	Rasio PDB Pariwisata	Persentase	4.4	4.6	<b>5</b>
SS2 Meningkatnya kualitas pariwisata	Jumlah Kunjungan wisatawan mancanegara	Juta Kunjungan	10,37 (tw 3)	17	<b>20,00-23,59</b>
	Jumlah Perjalanan wisatawan nusantara	Juta Kunjungan	83,36 (tw 3)	1.084,00	<b>1.500,00</b>
	Devisa Pariwisata	Miliar USD	7,46	22	<b>32-39.44</b>
SS3 Meningkatnya kualitas governansi kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	A	<b>A</b>

Keterangan: Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025 – 2029

### 3.2. Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif

#### 3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenekraf/Bekraf

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Arah Kebijakan menyatakan bahwa arah kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk itu dibentuklah arah kebijakan dan strategi Kemenekraf/Bekraf tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan/ sasaran strategis Kemenekraf/Bekraf tahun 2025-2029. Arah kebijakan Kemenekraf/Bekraf tahun 2025-2029 terbagi menjadi 4 (empat) ruang lingkup utama yaitu:

**Tabel 2.13**  
**Arah Kebijakan, Strategi, Program, dan Lini Masa Kemenekraf/Bekraf**  
**Periode 2025-2029**

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program Flagship
1	Kolaborasi horizontal dan vertikal dalam pengembangan ekonomi kreatif	Peningkatan kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan governansi kolaboratif multilevel dan multisektor	Advokasi untuk pembentukan Dinas Ekonomi Kreatif di Pemerintah Daerah dan peningkatan sub-urusan ekonomi kreatif menjadi urusan pemerintahan
			Pengarusutamaan ekonomi kreatif melalui co-creation secara nasional, regional, dan global (a.l. WCCE, G-CINC)
			Penyusunan Grand Design Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
			Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional
			Penyusunan Peta Jalan Ekonomi Kreatif Indonesia
			Revisi Peraturan Presiden tentang Gim
			Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus
			Ekonomi Kreatif
2	Penciptaan lapangan kerja dan peningkatan	Pembekalan kompetensi, alih kompetensi, dan peningkatan	Pengembangan talenta ekraf
			Pengembangan talenta digital
			Inkubasi pengembangan subsektor ekraf

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program Flagship
	kapasitas pelaku ekonomi kreatif	kompetensi kerja talenta ekonomi kreatif	Inkubasi produk kreatif berbasis riset dan berdaya saing
		Peningkatan pembiayaan	Fasilitasi akses pembiayaan pada subsektor ekraf prioritas Pekan pembiayaan ekraf
		Penguatan manajemen kekayaan intelektual ekonomi kreatif	Sosialisasi dan pendampingan HKI
			Kelas KI Komersialisasi HKI
		Pelindungan dan peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi kreatif	Pelindungan pekerja ekraf
			Peningkatan kesejahteraan pekerja ekraf
3	Pengembangan ekonomi kreatif yang memperkuat Asta Cita dan inklusivitas	Pemberian insentif bagi pelaku ekonomi kreatif	Program Insentif Riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif (Prospek) Bantuan insentif pemerintah untuk peningkatan produktivitas ekonomi kreatif Bantuan pemerintah sarana dan prasarana Bioskop alternatif AYO HARGAI (Bantuan untuk Gim Nasional onboarding di platform distribusi gim)
		Peningkatan inovasi dan kolaborasi	Aktivasi Rumah Kreatif (creative hub) dalam mendorong kreasi Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI)
		pengembangan ekonomi kreatif	Business Matching Pelaku Kreatif Pengembangan Open Innovation Platform Kolaborasi dengan institusi pendidikan dalam pengembangan produk kreatif digital
		Peningkatan pemasaran dan	Penyusunan strategi pemasaran ekspor

No	Arah Kebijakan	Strategi	Program Flagship
		penguatan rantai nilai dan rantai pasok ekonomi kreatif	Penyusunan strategi pemasaran dalam negeri
			Startup Scale Up Champion
			Indonesia Wastra Day
			Indonesian International IP Festival
			Penyelenggaraan pameran internasional ekonomi kreatif
			Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
			Visual Branding Kreatif Indonesia
4	Penguatan tata kelola pemerintahan Kemenekraf/Bekraf yang baik dan bersih	Penguatan citra positif	Peningkatan manajemen pelayanan publik
		Kemenekraf/Bekraf	Visual branding baru Kemenekraf/Bekraf
		Transformasi digital	Penyusunan dan pelaksanaan arsitektur dan peta rencana SPBE
		Kemenekraf/Bekraf	Penguatan manajemen pengetahuan berbasis big data sebagai strategi institutional information-based system
		Peningkatan kapasitas talenta dan meritokrasi Kemenekraf/Bekraf	Pembangunan dan pelaksanaan manajemen talenta
			Pembangunan dan pengembangan pembelajaran terintegrasi melalui corporate university
		Penguatan tata kelola yang baik dan modern	Pembangunan budaya kinerja, budaya risiko, dan budaya inovasi di lingkungan Kemenekraf/ Baparekraf
Pembangunan model tata kelola platform kolaboratif dalam pelaksanaan tugas			

Keterangan: Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025 – 2029

### 3.2.2 Target Kinerja

Kemenekraf/Bekraf diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan dalam pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu, terkhusus dalam Renstra 2025-2029 ini terdapat enam indikator sebagai penyumbang data makro untuk target kinerja Kemenekraf/Bekraf.

Adapun, Sasaran Strategis, Indikator serta Target yang diharapkan dapat dicapai Kemenekraf/Bekraf dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 2.14**  
**Target Kinerja Kemenekraf/Bekraf 2025-2029**

Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Target 2029
<b>Sasaran Strategis 1: Menguatnya kapasitas enabling factors ekosistem ekonomi kreatif</b>					
IKSS 1.1	Persentase progres pencapaian rencana induk pengembangan	%	n/a		
IKSS 1.2	Pertumbuhan investasi	%	n/a	7,3	8,08
IKSS 1.3	Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif	Juta orang	22,74	25,15	27,66
<b>Sasaran Strategis 2: Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional</b>					
IKSS 2.1	Pertumbuhan kekayaan intelektual ekonomi kreatif	%	n/a	2030	40
IKSS 2.2	Pertumbuhan ekspor ekonomi kreatif	%	n/a	5,15	5,96
<b>Sasaran Strategis 3: Meningkatnya kualitas governansi, kelembagaan, dan sumber daya manusia aparatur Kemenekraf/Bekraf</b>					
IKSS 3.1	Indeks Reformasi Birokrasi	Kategori	A	A	A

Keterangan: Renstra Kementerian Ekonomi Kreatif Tahun 2025 – 2029

Berdasarkan sumberdata (metadata) dan produk hukum kementerian pariwisata dan kementerian ekonomi kreatif republik indonesia, merilis renstra yaitu renstra kementerian pariwisata dan renstra kementerian ekonomi kreatif Republik Indonesia periode Tahun 2025-2029;

Faktor penghambat dan faktor pendorong dalam pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting untuk dianalisis agar sektor ini dapat berkembang dengan optimal. Berikut adalah beberapa faktor tersebut:

**Tabel 2.15**  
**Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Terhadap Renstra Kementerian/ Lembaga**

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
<b>Meningkatkan kualitas &amp; kuantitas Destinasi Pariwisata</b>	<b>Belum Optimalnya Penataan dan Pengembangan Destinasi Wisata</b>	obyek wisata yang kurang/tidak memiliki daya tarik/unik dari obyek wisata di daerah lain.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan nilai tambah destinasi dengan amenities, fasilitas, dan atraksi yang aksesable
		obyek wisata yang menarik dan unik umumnya memiliki skala jangkauan yang kecil.	kebijakan dan fasilitasi peningkatan keragaman daya tarik melalui atraksi atau rekayasa kebijakan yang aksesable
		daya saing dan nilai obyek wisata yang lemah	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
		pengelola destinasi yang belum profesional	kebijakan dan fasilitasi keterlibatan investasi, UMKMK, BUMD, PMDN, dan PMA, dan atau KPS
		belum lengkapnya fasilitas dan amenities yang ada di daerah destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
			kawasan destinasi
		kurang optimalnya ketersediaan dan kelayakan fasilitas aksesibilitas menuju destinasi wisata	kebijakan dan fasilitasi penyediaan amenities dan fasilitas di kawasan destinasi
		ketidakefektifan berbagai regulasi yang menghambat pengembangan destinasi dengan dasar pembagian kewenangan atas urusan dan anggaran	kebijakan dan fasilitas usulan yang bottom up dan lintas sektor untuk mengeliminasi masalah pembagian urusan dan anggaran
<b>Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif &amp; interaktif efisien,</b>	<b>Belum Optimalnya Promosi Pariwisata yang menarik Wisatawan</b>	Pemasaran dan atau promosi pariwisata yang diikuti skala internasional, nasional, regional, dan lokal lebih bersifat temporer, bukan bersifat sistemik	kebijakan dan fasilitasi sistem promosi dan pemasaran yang menyeluruh,
		keterbatasan materi pemasaran dan promosi pariwisata yang	kebijakan dan fasilitasi materi promosi melalui KKL yang bersifat vertikal dan horizotal

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		belum tepat sasaran	dengan pelibatan para pihak terkait
		Keterbatasan media pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif	kebijakan dan fasilitasi seleksi media yang efektif dan efisien
		keterbatasan informasi sasaran dan target pemasaran	kebijakan dan fasilitasi materi promosi dan media promosi melalui pelibatan para pihak terkait yang bersifat vertikal dan horisontal.
<b>Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional</b>	<b>Minimnya Sarana dan Prasarana peningkatan produk ekonomi kreatif</b>	belum tersedianya roadmap ekonomi kreatif banten yang detail sebagai pemicu kreatifitas publik	kebijakan dan fasilitasi pembangunan roadmap ekonomi kreatif banten yang komprehensif, komunikatif, dan bertanggung jawab
		belum kompetitifnya dunia usaha ekonomi kreatif karena kelemahan data, informasi, dan publikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya motif ekonomis dan aktivitas kompetisi melalui berbagai forum secara proposional

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		belum tersedianya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan kemajuan ekonomi kreatif	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya lembaga yang mampu memfasilitasi perkembangan ekonomi kreatif
		belum optimalnya partisipasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam upaya peningkatan daya saing seperti sertifikasi	kebijakan dan fasilitasi terbentuknya event yang bersifat lomba dan kompetisi
<b>Mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif efisien</b>	<b>Terbatasnya SDM Pariwisata dan Ekraf yang bersertifikat</b>	belum adanya arah kebijakan pengembangan peningkatan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif sebagai pengembangan potensi masyarakat, khususnya di sekitar destinasi	kebijakan dan fasilitasi pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang partisipatif dan komunikatif
		homogenitas masyarakat di kawasan destinasi mengakibatkan pertumbuhan	kebijakan dan fasilitasi yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial sebagai entry

Tujuan	Permasalahan Pelayanan SKPD*)	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		ekonomi dan sosial yang lambat	point pengembangan sumberdaya manusia

Keterangan : Dinas Pariwisata Banten tahun 2025

Berdasarkan tabel 3.6 secara umum, Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten telah mengakomodasi arah kebijakan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten terpilih yaitu menjadikan urusan pariwisata sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, selain itu renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten juga telah mengakomodasi arah kebijakan renstra Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

#### 4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan aspek ketataruangan, urusan pariwisata merupakan salah satu komponen dari pola ruang, khususnya pola ruang budidaya, sehingga mengingat pentingnya urusan pilihan didalam tata ruang tersebut, maka permendagri 86 Tahun 2017, mengamanatkan agar dalam proses penyusunan renstra juga menelaah keberadaan RTRW Provinsi Banten.

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

1. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
3. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;

- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
- i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Berdasarkan kedua penetapan di atas, sesuai dengan kewenangan pada tingkat provinsi, maka tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Banten adalah **“Mewujudkan penataan Ruang Wilayah Provinsi Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang strategis, aman, nyaman, Produktif Berkelanjutan dan berkeadilan melalui Pengembangan Pusat Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata.”**. Tujuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam bentuk kebijakan dan strategi pengembangan wilayah Provinsi Banten untuk mewujudkan pola dan struktur ruang wilayah Provinsi Banten Pola Ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 adalah Kawasan peruntukan pariwisata seluas lebih kurang 31.155 ha (tiga puluh satu ribu seratus lima puluh lima hektar) yang tersebar di empat Kabupaten dan empat Kota di Provinsi Banten melalui pendekatan perwilayahan:

1. Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Banten,
2. Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) dan
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP).

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Banten yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan hidup. Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

**Tabel 2.16**

**Pengaruh Indikator Program Struktur Ruang RTRW Provinsi Banten terhadap Layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029**

<b>No</b>	<b>Rencana Struktur Ruang</b>	<b>Struktur Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Pelayanan Dinas Pariwisata</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata</b>
1.	Peningkatan Sistem Jaringan Transportasi Laut	-	Peningkatan terminal khusus untuk mendukung potensi industri, pariwisata, pertanian, dan pertambangan	Mempermudah mobilisasi publik (wisata) dari dan ke destinasi wisata	
2	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Transportasi Darat	-	Rencana pembangunan jalan nasional	Mempermudah mobilisasi publik (wisata) dari dan ke destinasi wisata	
3	Peningkatan dan Pemeliharaan Sistem Jaringan Transportasi Darat		Rencana peningkatan kapasitas dan kualitas ruas jalan strategis nasional	Mempermudah mobilisasi publik (wisata) dari dan ke destinasi wisata	

Keterangan : Diolah dari RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043

**Tabel 2.17**  
**Pengaruh Indikator Program Pola Ruang RTRW Provinsi Banten terhadap Layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029**

<b>No</b>	<b>Pola Ruang</b>	<b>Pola Ruang Saat Ini</b>	<b>Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenaan</b>	<b>Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pariwisata</b>	<b>Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata</b>
1.	Pengendalian Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Cagar Budaya;	-	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
2	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Barat	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
3	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Utara	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
4	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Banten Lama	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
5	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Selatan	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
6	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan Kawasan Wisata Budaya Permukiman Baduy	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
7	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Wisata Alam Taman	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-

No	Pola Ruang	Pola Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang Terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Pariwisata	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Pariwisata
			Nasional Ujung Kulon		
8	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Wisata Alam Taman Nasional Gunung Halimun – Gunung Salak	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
9	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan dan Perlindungan Kawasan Wisata Geopark	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
10	Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata		Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Barat	Meningkatkan jumlah alternatif destinasi wisata	-
11	Pengembangan Kawasan Strategis Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi		Pengembangan dan Pengendalian Kawasan Tanjung Lesung – Panimbang	Optimalisasi pengembangan kawasan ekonomi khusus tanjung lesung	-

Keterangan : Diolah dari RTRW Provinsi Banten Tahun 2023-2043

### 2.2.2 Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan

dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Dinas Pariwisata Provinsi Banten senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh sebab itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pariwisata dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Arah dan strategi kebijakan pengembangan pariwisata akan sangat dipengaruhi nilai-nilai strategis dan kondisi lingkungan strategis internal dan lingkungan strategis eksternal Dinas Pariwisata. Analisa SWOT terhadap lingkungan strategis internal maupun eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap pengembangan pariwisata perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan langkah yang tepat dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengembangan pariwisata sesuai keadaan potensi pariwisata di Provinsi Banten.

Berdasarkan kajian aspek-aspek sebagaimana tersebut di atas maka dapat disampaikan isu-isu strategis pembangunan pariwisata di Provinsi Banten ditinjau dari gambaran pelayanan dinas dalam sasaran jangka menengah pada Renstra Dinas Pariwisata, Isu strategis Dinas Pariwisata adalah “ Belum optimalnya Kunjungan Wisatawan”. Isu Strategis Dinas Pariwisata tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Belum memadai pengelolaan destinasi pariwisata dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti akses jalan menuju destinasi, dan amenitas;
2. Belum optimal peran masyarakat dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dunia usaha pariwisata;
3. Belum optimal Promosi destinasi pariwisata di dalam & luar negeri secara langsung dan melalui pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana Dinas Pariwisata Provinsi Banten;
4. Terbatasnya dukungan pemerintah kabupaten/kota mendukung promosi pariwisata daerah;
5. Rendahnya Kompetensi dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pariwisata;
6. Terbatasnya ketersediaan data dan informasi kepariwisataan untuk mendukung penetapan kebijakan dan operasional kepariwisataan;



**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penentuan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Banten tahun 2025-2029 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Banten tahun 2025- 2029.

**3.1 Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Tujuan adalah Kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan perangkat daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan perlu dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan sekaligus menangani isu strategis. Tujuan harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pada setiap OPD. Serta tujuan merupakan ultimate outcome dari perangkat daerah yang akan dicapai dalam lima tahun kedepan (2025-2029), Untuk itu rumusan tujuan yang ditetapkan Dinas pariwisata Provinsi Banten tahun 2025-2029 adalah Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil, diperlukan alat ukur yang dapat menggambarkan capaian kinerja organisasi secara objektif dan terukur. Dua komponen penting dalam sistem pengukuran kinerja tersebut adalah **Indikator Kinerja Utama (IKU)** dan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)**.

1. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dari suatu instansi pemerintah. IKU mencerminkan output atau outcome utama yang paling berdampak terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi, serta menjadi tolok ukur kinerja yang paling signifikan dalam Renstra.

Tabel 3.1  
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.0.00.0.00.0 1.0000 - Dinas Pariwisata									
2.	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Triliun Rupiah	14,221	15,151	16,31	17,564	18,947	20,563	22,183	
3.	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	Triliun Rupiah	66,920	69,520	74,560	79,253	84,634	91,585	98,792	

- Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator pendukung yang digunakan untuk mengukur pencapaian program atau kegiatan dalam rangka mendukung tercapainya IKU. IKK lebih teknis dan operasional, serta dapat berasal dari unit-unit pelaksana teknis

Tabel 3.1.2  
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
2.	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	positif	Indeks	56.24	74	80	83	85	87	90	
3.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	positif	%	4.61	5.76	6.91	8.06	9.22	10.37	11.52	
4.	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	positif	%	1.81	2.11	2.41	2.71	3.01	3.31	3.61	
5.	Persentase Peningkatan Promosi Objek Wisata Provinsi	positif	%	4.41	4,80	5,18	6,21	7,25	8,28	9,32	
6.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	positif	%	5	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6	

### 3.2 Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan perangkat daerah. Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan tersebut diatas yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan sasaran memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan dan akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

**Tabel 3.2**  
**Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Sasaran**

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran (Indikator Kinerja Utama (KU))	Kondisi Awal (2024)	Target Capaian					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum (Triliun Rupiah)	14,221	15,151	16,31	17,564	18,947	20,563	22,183
	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (Triliun Rupiah)	66,920	69,520	74,560	79,253	84,634	91,585	98,792

### 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, lokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah;

1. Meningkatkan Kunjungan Wisatawan
2. Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kreatif

Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di laksanakan dengan serangkaian strategi (a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi; (b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif; (c) menerapkan prinsip Blue Green Circular Economy; (d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata; (e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata; (f) menguatkan pemasaran yang bertanggungjawab ; (g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan dan keselamatan; (h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi *Indonesia Quality Tourism Fund*; (i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan geopark (terutama *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark*), *diving dan snorkeling, surfing, island hopping, wellness, medical, adventure, culture, event, meeting, incentives, conventions and exhibitions, yacht and cruise, gastronomi*, pariwisata ramah muslim, *digital nomad*; (j) mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta (k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus. Strategi dalam mencapai tujuan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan:

Tabel 3.3  
Tahapan RPJMD

STRATEGI	TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
<p>Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui:</p> <p>1) Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis sektor unggulan daerah (sektor industri, perdagangan, jasa, ekonomi kreatif, pariwisata prioritas (religi, sejarah/budaya, alam, dan buatan), perikanan (tangkap dan budidaya), pertanian, dan sektor unggulan lainnya) secara inklusif yang memberdayakan masyarakat lokal;</p> <p>2) Pengembangan ekonomi yang berbasis inovasi, daya saing dan hilirisasi;</p> <p>3) Optimalisasi ekonomi syariah, ekonomi biru, ekonomi hijau serta penguatan ekosistem halal dan perluasan pasar sebagai bentuk terobosan baru terhadap peningkatan ekonomi daerah;</p> <p>4) Serta ditunjang dengan penguatan konektivitas dan infrastruktur ekonomi daerah</p>	<p>TEMA PENGUATAN FONDASI PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MELALUI PENDIDIKAN INKLUSIF DAN INFRASTRUKTUR DASAR BERKELANJUTAN</p>	<p>TEMA PENINGKATAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA BERINTEGRITAS DAN INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL</p>	<p>TEMA PENGUATAN KOLABORASI MENUJU DAYA SAING PERKONOMIAN</p>	<p>PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU EKONOMI BERBASIS INOVASI</p>	<p>PENCAPAIAN FONDASI KUAT PEMERATAAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</p>
	<p>ARAH KEBIJAKAN : Pengembangan sektor pariwisata unggulan yang berkualitas dan berkelanjutan (destinasi wisata berbasis budaya, religi, sejarah, alam, dan buatan); penguatan ekosistem ekonomi kreatif (film, fesyen, kuliner, dan peningkatan kualitas produk lokal Banten lainnya); penguatan ekosistem ekonomi (syariah, biru, dan hijau); penguatan koperasi dan UKM; dan penguatan Badan Usaha Milik Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah</p>	<p>ARAH KEBIJAKAN : Penguatan ekonomi kerakyatan (penguatan koperasi, digitalisasi UKM, pemberdayaan kelompok tani, nelayan, sektor kreatif dan pariwisata berbasis lokal secara inklusif); peningkatan daya saing (industri, perdagangan, dan jasa); dan hilirisasi berbasis rantai pasok (penguatan industri halal, pengembangan kawasan industri ramah lingkungan, dan penguatan inovasi berbasis digital dan teknologi dalam peningkatan produktivitas industri dan perdagangan)</p>	<p>ARAH KEBIJAKAN : Peningkatan kawasan industri berbasis ramah lingkungan yang terintegrasi dengan pasar; penguatan sistem logistik terpadu dalam menekan biaya distribusi; penguatan tata kelola kawasan wisata didukung SDM pariwisata yang berkompeten; dan perluasan akses terhadap sertifikasi halal dan produk halal</p>	<p>ARAH KEBIJAKAN : Penguatan kolaborasi pentahelix dalam memperluas akses pembiayaan dan inkubasi bisnis; memperkuat integrasi rantai pasok sebagai wujud mendorong peningkatan investasi pada kawasan industri dan UKM; mendorong pemberdayaan pelaku UKM, koperasi, dan pariwisata; dan peningkatan produktivitas sektor industri, pertanian, perikanan (tangkap dan budidaya), koperasi, UKM, dan pariwisata melalui hilirisasi, perluasan pasar, dan modernisasi sarana dan prasarana</p>	<p>ARAH KEBIJAKAN : Pemantapan industrialisasi, perdagangan, pariwisata, hilirisasi sektor perikanan (tangkap dan budidaya), dan pertanian yang terintegrasi dengan kemudahan akses terhadap distribusi dan pasar; serta menjadikan Provinsi Banten sebagai sektor wisata halal, produk halal dan pusat ekonomi syariah</p>

Tabel 3.3.1  
Tahapan RENSTRA

<b>Program Urusan Pariwisata</b>	<b>TAHAP I (2026) Tema: Penguatan Fondasi Pemerataan Kesejahteraan</b>	<b>TAHAP II (2027) Tema: Daya Saing SDM &amp; Ekonomi Global</b>	<b>TAHAP III (2028) Tema: Kolaborasi untuk Daya Saing Ekonomi</b>	<b>TAHAP IV (2029) Tema: Inovasi Ekonomi</b>	<b>TAHAP V (2030) Tema: Pemerataan Kesejahteraan</b>
<b>1. Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>	Penataan dan pemetaan destinasi unggulan dan berkelanjutan	Pengembangan destinasi berbasis potensi ekonomi, religi & budaya lokal	Penguatan destinasi berbasis potensi ekonomi, religi & budaya lokal	Pengembangan destinasi inovatif berbasis digital	Mendorong pengembangan destinasi wisata yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan
<b>2. Pemasaran Pariwisata</b>	Penyusunan strategi promosi awal dan branding identitas pariwisata Banten	Promosi produk unggulan pariwisata ke pasar nasional	kolaborasi event promosi pariwisata	Inovasi promosi pariwisata berbasis digital	Promosi Banten sebagai destinasi unggulan Nasional
<b>3. Pengembangan Ekonomi Kreatif &amp; HKI</b>	Edukasi HKI & pemetaan potensi ekonomi kreatif lokal	Pendaftaran HKI dan dukungan legalitas produk Halal	Kolaborasi pelaku ekraf lintas daerah	Inovasi produk kreatif dan dukungan inkubasi	Digital Marketing Produk ekonomi kreatif
<b>4. Pengembangan SDM Pariwisata &amp; Ekonomi Kreatif</b>	Pelatihan SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Sertifikasi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Sinergi antar lembaga pelatihan & pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan SDM inovatif dan adaptif	Pemberdayaan Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif
<b>5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi</b>	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengelolaan dan pengintegrasian perencanaan, penganggaran dan pengendalian evaluasi pembangunan

Tabel 3.3.2  
Tujuan Dan Sasaran

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata</b>											
Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	7.06	6.53	7.65	7.69	7.88	8.53	7.88	
			Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif (%)	5.10	3.89	7.25	6.29	6.79	8.21	7.87	
		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (triliun rupiah)	14.221	15.151	16.310	17.564	18.947	20.563	22.183	
			Nilai PDRB Ekonomi Kreatif (triliun rupiah)	66.920	69.520	74.560	79.253	84.634	91.585	98.792	

### 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Arah kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Banten adalah:

1. Meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kreatif

Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di laksanakan dengan serangkaian strategi (a) meningkatkan kelembagaan dan tata kelola destinasi; (b) meningkatkan industri dan rantai pasok inklusif; (c) menerapkan prinsip Blue Green Circular Economy; (d) membangun infrastruktur hijau untuk infrastruktur dasar dan pendukung pariwisata; (e) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pariwisata; (f) menguatkan pemasaran yang bertanggungjawab ; (g) meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko kebencanaan, keamanan dan keselamatan; (h) mengembangkan mekanisme pembiayaan dan implementasi *Indonesia Quality Tourism Fund*; (i) diversifikasi atraksi pariwisata yang difokuskan pada pengembangan geopark (terutama *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Global Geopark*), *diving dan snorkeling, surfing, island hopping, wellness, medical, adventure, culture, event, meeting, incentives, conventions and exhibitions, yacht and cruise, gastronomi*, pariwisata ramah muslim, *digital nomad*; (j) mengembangkan kawasan ekonomi khusus pariwisata di destinasi pariwisata prioritas, serta (k) mengembangkan destinasi pariwisata bahari yang mendukung ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru dalam Prioritas Nasional. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus.

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGARA BIDANG URUSAN**

Program adalah penjabaran Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rumusan kebijakan yang tepat akan melahirkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dalam lima tahun mendatang. Setiap program memiliki fungsi masing-masing. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan ditentukan program dan kegiatan serta indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan. Program yang digunakan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2025-2029 sebanyak lima program, yaitu:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Dari 5 (lima) program diatas kemudian dijabarkan menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan dan 69 (enam puluh sembilan) subkegiatan yang menunjang indikator kinerja utama. Rincian lebih lanjut mengenai Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Indikator Kinerja, dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1  
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					32.392.552.000,00		33.470.595.000,00		35.394.958.000,00		39.404.073.000,00		40.243.576.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					24.301.960.000,00		25.110.744.000,00		26.554.463.000,00		29.562.234.000,00		30.192.057.000,00	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah (Indeks)	56.24	74	80	24.301.960.000,00	83	25.110.744.000,00	85	26.554.463.000,00	87	29.562.234.000,00	90	30.192.057.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					4.116.651.000,00		4.253.655.000,00		4.498.216.000,00		5.007.719.000,00		5.114.409.000,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)	5	5.1	5.2	4.116.651.000,00	5.4	4.253.655.000,00	5.6	4.498.216.000,00	5.8	5.007.719.000,00	6	5.114.409.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.921.104.000,00		1.985.039.000,00		2.099.168.000,00		2.336.936.000,00		2.386.724.000,00	
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi Objek Wisata Provinsi (%)	4.41	4,80	5,18	1.921.104.000,00	6,21	1.985.039.000,00	7,25	2.099.168.000,00	8,28	2.336.936.000,00	9,32	2.386.724.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					1.174.618.000,00		1.213.710.000,00		1.283.491.000,00		1.428.870.000,00		1.459.312.000,00	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	4.61	5.76	6.91	1.174.618.000,00	8.06	1.213.710.000,00	9.22	1.283.491.000,00	10.37	1.428.870.000,00	11.52	1.459.312.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					878.219.000,00		907.447.000,00		959.620.000,00		1.068.314.000,00		1.091.074.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	1.81	2.11	2.41	878.219.000,00	2.71	907.447.000,00	3.01	959.620.000,00	3.31	1.068.314.000,00	3.61	1.091.074.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					32.392.552.000,00		33.470.595.000,00		35.394.958.000,00		39.404.073.000,00		40.243.576.000,00	

Tabel 4.2  
Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata</b>									
- Meningkatnya Produktivitas Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif				Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				
					Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif				
					Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum				
					Nilai PDRB Ekonomi Kreatif				
		Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
							Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	3.26.02.1.01.0001 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	3.26.02.1.01.0006 - Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	
				Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
				Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	3.26.02.1.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3.26.02.1.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	3.26.02.1.03.0009 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	3.26.02.1.03.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	3.26.02.1.03.0011 - Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.03.0012 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	
				Terfasilitasinya Rekomendasi Teknis Usaha Pariwisata yang di terbitkan	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	3.26.02.1.04.0009 - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	3.26.02.1.04.0010 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	
			Meningkatnya pemasaran pariwisata		Persentase Peningkatan Promosi Objek Wisata Provinsi	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.1.01.0001 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	3.26.03.1.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3.26.03.1.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
				Meningkatnya Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	3.26.04.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	3.26.04.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	
					Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3.26.04.1.01.0006 - Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	
				Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	3.26.04.1.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran	
					Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	3.26.04.1.02.0012 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	
					Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	3.26.04.1.02.0013 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual	
					Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	3.26.04.1.02.0015 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	3.26.04.1.02.0017 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	3.26.04.1.02.0019 - Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif		Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
				Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	3.26.05.1.01.0004 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pembedayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	3.26.05.1.01.0014 - Pembedayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.01.0017 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
				Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	
					Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	3.26.05.1.02.0007 - Fasilitas Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	

Tabel 4.3  
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata</b>										
<b>I</b>	<b>INDIKATOR KINERJA KUNCI</b>									
1	Persentase Peningkatan Promosi Objek Wisata Provinsi	%	4.41	4,80	5,18	6,21	7,25	8,28	9,32	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%	5	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6	
3	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	1.81	2.11	2.41	2.71	3.01	3.31	3.61	
4	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	4.61	5.76	6.91	8.06	9.22	10.37	11.52	
5	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	Indeks	56.24	74	80	83	85	87	90	

Tabel 4.4  
Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan Dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				30.294.149.38 8,00		32.068.884.00 0,00		33.142.254.00 0,00		34.751.142.00 0,00		35.583.555.00 0,00		
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				23.315.930.38 8,00		23.709.033.00 0,00		24.301.759.00 0,00		24.909.303.00 0,00		25.532.036.00 0,00		
Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	56.24	80	23.315.930.38 8,00	83	23.709.033.00 0,00	85	24.301.759.00 0,00	87	24.909.303.00 0,00	90	25.532.036.00 0,00	3.26.00.00.01.0000 - Dinas Pariwisata	
3.26.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				163.000.000,0 0		163.000.000,0 0		163.000.000,0 0		163.000.000,0 0		163.000.000,0 0		
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	163.000.000,0 0	1	163.000.000,0 0	1	163.000.000,0 0	1	163.000.000,0 0	1	163.000.000,0 0		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1		1		1		1		1			
3.26.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
3.26.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
3.26.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
3.26.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		7.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00	1	7.000.000,00		
3.26.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00	6	20.000.000,00		
3.26.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tertindaknya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00		
3.26.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tertindaknya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
3.26.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tertindaknya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00	1	45.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.469.556.38 1,00		19.754.250.00 0,00		20.235.856.00 0,00		20.729.502.00 0,00		21.235.490.00 0,00		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	74	19.469.556.38 1,00	74	19.754.250.00 0,00	74	20.235.856.00 0,00	74	20.729.502.00 0,00	74	21.235.490.00 0,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12		12		12		12		12			
3.26.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				18.979.556.38 1,00		19.264.250.00 0,00		19.745.856.00 0,00		20.239.502.00 0,00		20.745.490.00 0,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54	74	18.979.556.38 1,00	74	19.264.250.00 0,00	74	19.745.856.00 0,00	74	20.239.502.00 0,00	74	20.745.490.00 0,00		
3.26.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				460.000.000,0 0		460.000.000,0 0		460.000.000,0 0		460.000.000,0 0		460.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	460.000.000,00	12	460.000.000,00	12	460.000.000,00	12	460.000.000,00	12	460.000.000,00		
3.26.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
3.26.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
3.26.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00	18	5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terkelolanya Barang Milik Daerah secara tertib	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
3.26.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.000.000,00		
3.26.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Meningkatnya Prestasi Kinerja ASN	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00	2	55.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100		100		100		100		100			
3.26.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00	2	15.000.000,00		
3.26.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00		
3.26.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		
Persentase Administrasi Umum yang dikelola dengan baik	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00	1	600.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3		3		3		3		3			
3.26.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00	4	120.000.000,00		
3.26.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00	3	20.000.000,00		
3.26.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
3.26.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00		
3.26.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00	2	200.000.000,00		
3.26.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
3.26.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang				650.000.000,00		757.783.000,00		850.000.000,00		1.000.000.000,00		1.050.000.000,00		
Urusan Pemerintah Daerah														
Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Terpenuhi	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	650.000.000,00	1	757.783.000,00	1	850.000.000,00	1	1.000.000.000,00	1	1.050.000.000,00		
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1		0		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	5		2		4		4		4			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1		1		0		1		1			
3.26.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		0	-	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
3.26.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		0	-	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00	3	100.000.000,00		
3.26.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel				100.000.000,00		50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	1	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.26.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				150.000.000,00		57.783.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	5	150.000.000,00	2	57.783.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00	4	100.000.000,00		
3.26.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		-		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0	1	200.000.000,00	0	-	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.26.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				200.000.000,00		200.000.000,00		-		150.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	0	-	1	150.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.26.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.714.374.007,00		1.715.000.000,00		1.733.903.000,00		1.697.801.000,00		1.764.546.000,00		
Persentase Terpenuhi Pelayanan Penunjang Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.714.374.007,00	12	1.715.000.000,00	12	1.733.903.000,00	12	1.697.801.000,00	12	1.764.546.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12		12		12		12			
3.26.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				449.374.007,00		450.000.000,00		468.903.000,00		432.801.000,00		499.546.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	449.374.007,00	12	450.000.000,00	12	468.903.000,00	12	432.801.000,00	12	499.546.000,00		
3.26.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.265.000.000,00		1.265.000.000,00		1.265.000.000,00		1.265.000.000,00		1.265.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	1.265.000.000,00	12	1.265.000.000,00	12	1.265.000.000,00	12	1.265.000.000,00	12	1.265.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				660.000.000,0		660.000.000,0		660.000.000,0		660.000.000,0		660.000.000,0		
Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	26	660.000.000,0	26	660.000.000,0	26	660.000.000,0	26	660.000.000,0	26	660.000.000,0		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6		6		6		6		6			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76	76		76		76		76		76			
3.26.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				250.000.000,0		250.000.000,0		250.000.000,0		250.000.000,0		250.000.000,0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6	250.000.000,0	6	250.000.000,0	6	250.000.000,0	6	250.000.000,0	6	250.000.000,0		
3.26.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				210.000.000,0		210.000.000,0		210.000.000,0		210.000.000,0		210.000.000,0		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	26	210.000.000,0	26	210.000.000,0	26	210.000.000,0	26	210.000.000,0	26	210.000.000,0		
3.26.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				100.000.000,0		100.000.000,0		100.000.000,0		100.000.000,0		100.000.000,0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	76	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00	76	100.000.000,00		
3.26.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				3.125.382.000,00		4.253.655.000,00		4.498.216.000,00		5.007.719.000,00		5.114.409.000,00		
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	5	5.2	3.125.382.000,00	5.4	4.253.655.000,00	5.6	4.498.216.000,00	5.8	5.007.719.000,00	6	5.114.409.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata	
3.26.02.1.01 - Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi				200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	0	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	0	2		2		2		2		2			
3.26.02.1.01.0001 - Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	0	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00		
3.26.02.1.01.0006 - Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				500.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2	2	500.000.000,00	2	1.100.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00		
3.26.02.1.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				500.000.000,00		1.100.000.000,00		1.200.000.000,00		1.500.000.000,00		1.500.000.000,00		
Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2	2	500.000.000,00	2	1.100.000.000,00	2	1.200.000.000,00	2	1.500.000.000,00	2	1.500.000.000,00		
3.26.02.1.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				2.175.382.000,00		2.503.655.000,00		2.648.216.000,00		2.857.719.000,00		2.964.409.000,00		
Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	0	2	2.175.382.000,00	2	2.503.655.000,00	2	2.648.216.000,00	2	2.857.719.000,00	2	2.964.409.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		4		4		4		4		4			
	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100	100		100		100		100		100			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.02.1.03.0001 - Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi				100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	0	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0	2	100.000.000,0 0		
3.26.02.1.03.0002 - Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		100.000.000,0 0		
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	2	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0	1	100.000.000,0 0		
3.26.02.1.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				800.000.000,0 0		1.100.000.000,0 00		1.200.000.000,0 00		1.400.000.000,0 00		1.500.000.000,0 00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara		5	800.000.000,0 0	5	1.100.000.000,0 00	5	1.200.000.000,0 00	5	1.400.000.000,0 00	5	1.500.000.000,0 00		
3.26.02.1.03.0009 - Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0		
3.26.02.1.03.0010 - Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi				175.382.000,0 0		203.655.000,0 0		248.216.000,0 0		257.719.000,0 0		264.409.000,0 0		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	100	100	175.382.000,0 0	100	203.655.000,0 0	100	248.216.000,0 0	100	257.719.000,0 0	100	264.409.000,0 0		
3.26.02.1.03.0011 - Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi				300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		300.000.000,0 0		
Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0	1	300.000.000,0 0		
3.26.02.1.03.0012 - Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		400.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00	4	400.000.000,00		
3.26.02.1.04 - Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi				250.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
Terfasilitasinya Rekomendasi Teknis Usaha Pariwisata yang di terbitkan	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1	1	250.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00	1	450.000.000,00		
	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	2	2		2		2		2		2			
3.26.02.1.04.0009 - Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)				150.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		250.000.000,00		
Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	2	2	150.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00		
3.26.02.1.04.0010 - Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				1.800.000.000,00		1.985.039.000,00		2.099.168.000,00		2.336.936.000,00		2.386.724.000,00		
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi Objek Wisata Provinsi	4,41	5,18	1.800.000.000,00	6,21	1.985.039.000,00	7,25	2.099.168.000,00	8,28	2.336.936.000,00	9,32	2.386.724.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata	
3.26.03.1.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				1.800.000.000,00		1.985.039.000,00		2.099.168.000,00		2.336.936.000,00		2.386.724.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	3	1.800.000.000,00	3	1.985.039.000,00	3	2.099.168.000,00	3	2.336.936.000,00	3	2.386.724.000,00		
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	1		1		1		1		1			
3.26.03.1.01.0001 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				500.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	3	3	500.000.000,00	3	600.000.000,00	3	600.000.000,00	3	700.000.000,00	3	700.000.000,00		
3.26.03.1.01.0005 - Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata				700.000.000,00		750.000.000,00		800.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	4	1	700.000.000,00	1	750.000.000,00	1	800.000.000,00	1	900.000.000,00	1	900.000.000,00		
3.26.03.1.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				600.000.000,00		635.039.000,00		699.168.000,00		736.936.000,00		786.724.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	3	2	600.000.000,00	2	635.039.000,00	2	699.168.000,00	2	736.936.000,00	2	786.724.000,00		
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL				1.174.618.000,00		1.213.710.000,00		1.283.491.000,00		1.428.870.000,00		1.459.312.000,00		
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	4.61	6.91	1.174.618.000,00	8.06	1.213.710.000,00	9.22	1.283.491.000,00	10.37	1.428.870.000,00	11.52	1.459.312.000,00	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04.1.01 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				474.618.000,0 0		513.710.000,0 0		583.491.000,0 0		728.870.000,0 0		759.312.000,0 0		
Meningkatnya Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1	1	474.618.000,0 0	1	513.710.000,0 0	1	583.491.000,0 0	1	728.870.000,0 0	1	759.312.000,0 0		
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	0	1		1		1		1		1			
3.26.04.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar				124.618.000,0 0		163.710.000,0 0		183.491.000,0 0		228.870.000,0 0		209.312.000,0 0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	0	1	124.618.000,0 0	1	163.710.000,0 0	1	183.491.000,0 0	1	228.870.000,0 0	1	209.312.000,0 0		
3.26.04.1.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		150.000.000,0 0		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0	1	150.000.000,0 0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.04.1.01.0006 - Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik				200.000.000,0		200.000.000,0		250.000.000,0		350.000.000,0		400.000.000,0		
Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	1	1	200.000.000,0	1	200.000.000,0	1	250.000.000,0	1	350.000.000,0	1	400.000.000,0		
3.26.04.1.02 - Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				700.000.000,0		700.000.000,0		700.000.000,0		700.000.000,0		700.000.000,0		
Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	1	700.000.000,0	1	700.000.000,0	1	700.000.000,0	1	700.000.000,0	1	700.000.000,0		
	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0	0		0		0							
	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	0	1		1		1							
	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0	1		1		1							
	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	20	20		20		20							
3.26.04.1.02.0005 - Pengembangan Sistem Pemasaran				150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0	1	150.000.000,0	1	150.000.000,0	1	150.000.000,0	1	150.000.000,0	1	150.000.000,0		
3.26.04.1.02.0012 - Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1	1	150.000.000,0	1	150.000.000,0	1	150.000.000,0	1	150.000.000,0		150.000.000,0		
3.26.04.1.02.0013 - Fasilitasi Kekayaan Intelektual				150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		150.000.000,0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	20	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00	20	150.000.000,00		
3.26.04.1.02.0015 - Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
3.26.04.1.02.0017 - Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	0	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
3.26.04.1.02.0019 - Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif				-		-		-		-		-		
Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				878.219.000,00		907.447.000,00		959.620.000,00		1.068.314.000,00		1.091.074.000,00		
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	1.81	2.41	878.219.000,00	2.71	907.447.000,00	3.01	959.620.000,00	3.31	1.068.314.000,00	3.61	1.091.074.000,00	3.26.000.000.01.0000 - Dinas Pariwisata	
3.26.05.1.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan				480.000.000,00		495.000.000,00		535.000.000,00		625.000.000,00		625.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	100	50	480.000.000,00	50	495.000.000,00	50	535.000.000,00	50	625.000.000,00	50	625.000.000,00		
	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	50		50		50		50					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100	100		100		100		100		50				
3.26.05.1.01.0004 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				300.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00			
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	100	100	300.000.000,00	100	315.000.000,00	100	315.000.000,00	100	325.000.000,00	50	325.000.000,00			
3.26.05.1.01.0014 - Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata				90.000.000,00		90.000.000,00		120.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan pariwisata	100	50	90.000.000,00	50	90.000.000,00	50	120.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00			
3.26.05.1.01.0017 - Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				90.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00			
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	100	50	90.000.000,00	50	90.000.000,00	50	100.000.000,00	50	150.000.000,00	50	150.000.000,00			
3.26.05.1.02 - Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif				398.219.000,00		412.447.000,00		424.620.000,00		443.314.000,00		466.074.000,00			
Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100	100	398.219.000,00	100	412.447.000,00	100	424.620.000,00	100	443.314.000,00	100	466.074.000,00			
	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100	50		50		50		50		50				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.26.05.1.02.0001 - Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				98.219.000,00		97.447.000,00		109.620.000,00		118.314.000,00		141.074.000,00		
Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	100	50	98.219.000,00	50	97.447.000,00	50	109.620.000,00	50	118.314.000,00	50	141.074.000,00		
3.26.05.1.02.0007 - Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif				300.000.000,00		315.000.000,00		315.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	100	100	300.000.000,00	100	315.000.000,00	100	315.000.000,00	100	325.000.000,00	100	325.000.000,00		

Tabel 4.5

Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

<b>NO</b>	<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>
<b>3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata</b>				
1.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26.02.1.02 - Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	
			3.26.02.1.02.0007 - Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	

Tabel 4.6  
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	3.26.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Pariwisata									
2.	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	triliun rupiah	14,221	15,151	16,31	17,564	18,947	20,563	22,183	
3.	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	triliun rupiah	66,92	69,52	74,56	79,253	84,634	91,585	98,792	

Tabel 4.7  
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
2.	Indeks Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah	positif	Indeks	56.24	74	80	83	85	87	90	
3.	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	positif	%	4.61	5.76	6.91	8.06	9.22	10.37	11.52	
4.	Persentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	positif	%	1.81	2.11	2.41	2.71	3.01	3.31	3.61	
5.	Persentase Peningkatan Promosi Objek Wisata Provinsi	positif	%	4.41	4,80	5,18	6,21	7,25	8,28	9,32	
6.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	positif	%	5	5.1	5.2	5.4	5.6	5.8	6	

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun sesuai amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dimana Kepala Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten ini menyesuaikan dan mengakomodir visi, misi Provinsi Banten yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029, dimana berisi penjabaran dari visi dan misi Provinsi Banten, yang dituangkan dalam tujuan, sasaran serta strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang disertai kerangka pendanaan indikatif tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2025-2029.

Pada periode Tahun 2025-2029 mendatang, Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai salah satu perangkat daerah Provinsi Banten memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkan Visi Pembangunan Banten Tahun 2025-2029, sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025-2029, yaitu *“Banten Maju, Adil, Merata Tidak Korupsi”*.

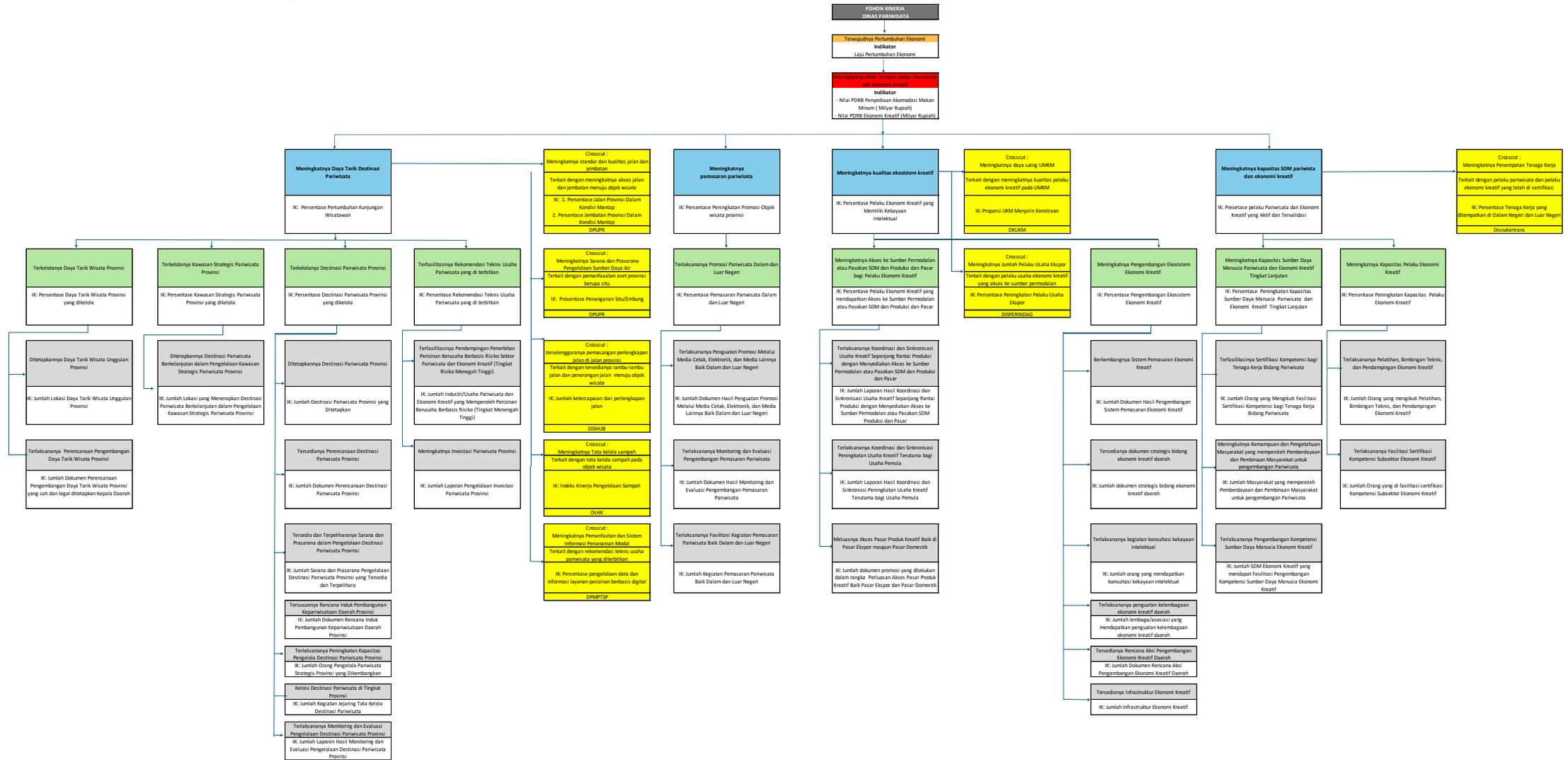
Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan perencanaan penganggaran;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara pemerintah Provinsi Banten dengan Dinas Pariwisata Provinsi Banten.

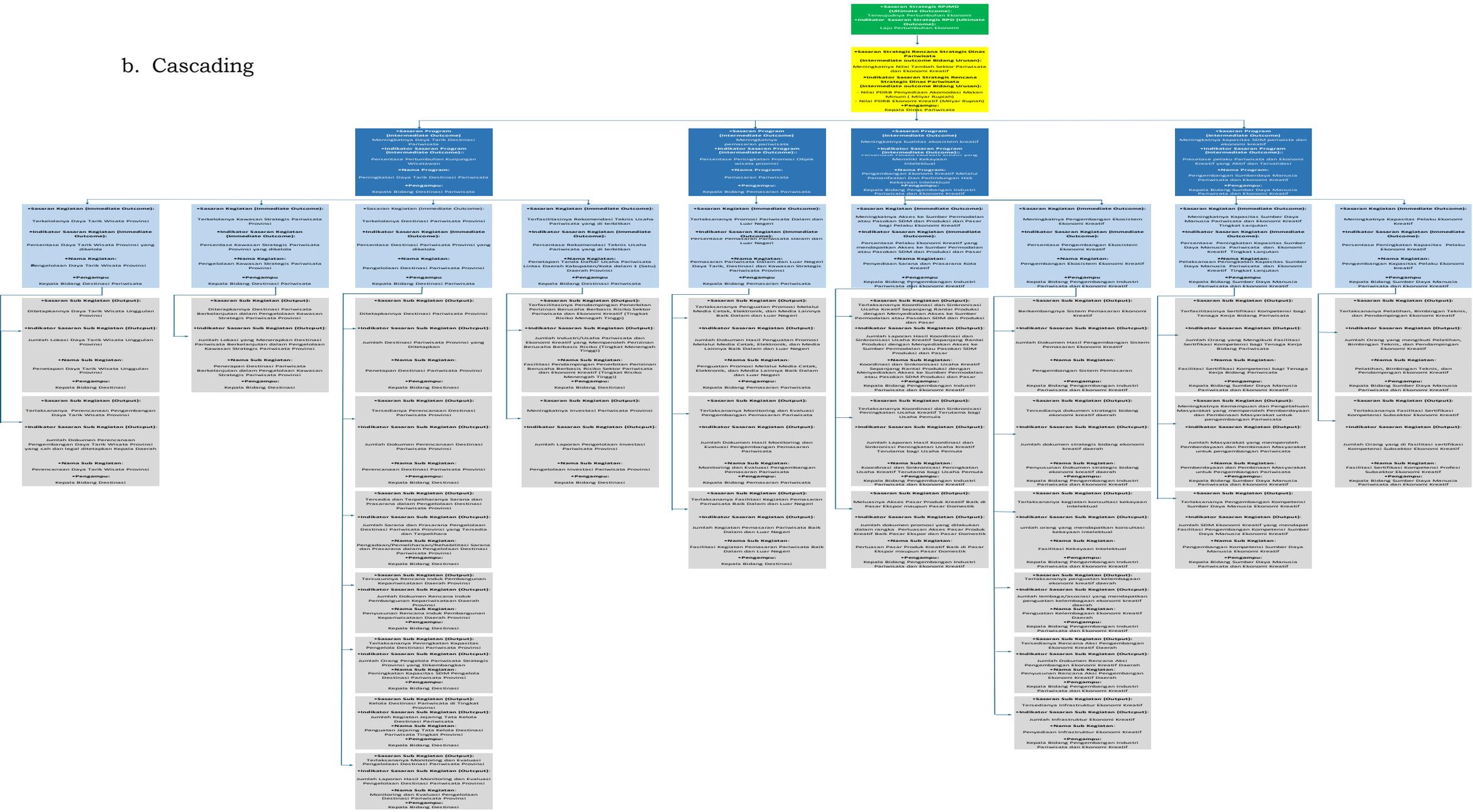
Keberhasilan dan Implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2025-2029 sangat tergantung dari komitmen, kesepakatan, kesepahaman Dinas Pariwisata Provinsi Banten mulai dari pimpinan sampai dengan pelaksana.

# LAMPIRAN

a. Pohon kinerja



## b. Cascading



### c. Definisi Operasional

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Pertumbuhan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Positif	Persen	(Jumlah PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun N dikurangi Jumlah PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun N-1 di bagi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun N-1)*100	Selisih PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun Berkenaan terhadap PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum Tahun Sebelumnya disajikan dalam bentuk Persentase	semakin meningkatnya PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat	Tahunan	BPS Provinsi Banten	6,53	7,65	7,69	7,88	8,53	7,88
	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Ekonomi Kreatif	Positif	Persen	(Jumlah PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun N dikurangi Jumlah PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun N-1 di bagi PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun N-1)*100	Selisih PDRB Sektor Ekonomi Kreatif Tahun Berkenaan terhadap PDRB sektor Ekonomi Kreatif Tahun Sebelumnya disajikan dalam bentuk Persentase	semakin meningkatnya PDRB Sektor Ekonomi Kreatif maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat	Tahunan	BPS Provinsi Banten	3,89	7,25	6,29	6,79	8,21	7,87
Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum	Positif	Milyar Rupiah	Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum diambil dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha penyediaan Akomodasi Makan Minum	Nilai PDRB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh pelaku usaha di sektor penyediaan layanan penginapan serta makanan dan minuman, dalam wilayah Provinsi Banten pada tahun n.	semakin Tinggi Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum maka semakin meningkatnya Sektor Pariwisata Provinsi Banten.	Tahunan	BPS Provinsi Banten	15.151	16.310	17.564	18.947	20.563	22.183
	Nilai PDRB Ekonomi Kreatif	Positif	Milyar Rupiah	PDRB Ekraf Provinsi = $\Sigma$ (Share 7 Lapangan Usaha dalam PDB Ekraf 2017 x PDRB 7 Lapangan Usaha pada tahun n)  Tujuh Lapangan Usaha:	Share Tujuh Lapangan Usaha Ekraf mengambil data tahun 2017 dari hasil konsensus BAPPENAS dan BPS. Tujuh lapangan usaha ekonomi kreatif di peroleh dari nilai PDRB ADHK pada tahun berkenaan yang di release BPS.	semakin Tinggi Nilai PDRB Ekonomi Kreatif maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat	Tahunan	BPS Provinsi Banten	70.279	74.560	79.253	84.634	91.585	98.792

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				1. Industri Pengolahan 2. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3. Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum 4. Informasi dan Komunikasi 5. Jasa Perusahaan 6. Jasa Pendidikan 7. Jasa lainnya										
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Positif	Persen	(Jumlah wisatawan tahun n dikurangi Jumlah wisatawan tahun n-1 di bagi Jumlah wisatawan tahun n-1 )x 100%	Selisih Jumlah Wisatawan Tahun Berkenaan terhadap Jumlah Wisatawan Tahun Sebelumnya disajikan dalam bentuk Persentase, yang di peroleh dari aplikasi SIMPARDA (Sistem Informasi Manajemen Pariwisata Daerah)	Semakin Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan maka pertumbuhan Ekonomi akan semakin meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	5,10%	5,20%	5,40%	5,60%	5,80%	6%
Terkelolanya Daya Tarik Wisata Provinsi	Persentase Daya Tarik Wisata Provinsi yang dikelola	Positif	Persen	(Jumlah Daya tarik wisata yang dikelola di tahun n dibagi target tahun N)* 100%	Daya Tarik Wisata adalah objek wisata yang di dikelola/ ditata berdasarkan jumlah objek wisata yang ada di provinsi	semakin menarik objek wisata maka jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi				Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya Tarik Wisata terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Daya Tarik Wisata Unggulan adalah daya tarik wisata yang memiliki ketersediaan sumber daya dan daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan fasilitas umum, aksesibilitas, kesiapan dan keterlibatan masyarakat, potensi pasar wisatawan, dan posisi strategis pariwisata dalam pembangunan daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah				Dokumen Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi adalah dokumen Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata atau dikenal juga dengan Masterplan Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan salah satu dokumen perencanaan yang dibutuhkan untuk menjadi acuan pembangunan dan pengelolaan daya tarik wisata. Rencana Induk Pengembangan Daya Tarik Wisata merupakan bagian integral dari Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional serta terintegrasi dengan dokumen RTRW dan RDTR daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terkelolanya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Persentase Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola	Positif	Persen	(Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikelola di tahun n dibagi target tahun N) * 100%	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi adalah Kawasan Strategis yang di kelola/ ditata berdasarkan jumlah kawasan strategis pariwisata provinsi yang telah ditetapkan	semakin terkelola kawasan strategis pariwisata maka jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				<p>Melaksanakan penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan dan/atau tangguh bencana di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jumlah lokasi destinasi yang stakeholders terkait bidang pariwisatanya diberikan pemahaman melalui sosialisasi/bimbingan teknis Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan.</li> <li>jumlah lokasi destinasi wisata yang telah melakukan pengukuran atau asesmen mandiri prinsip pariwisata berkelanjutan (kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021) dan destinasi tangguh bencana (Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan).</li> <li>jumlah lokasi destinasi pariwisata yang disertifikasi berkelanjutan (sesuai kriteria dan indikator Permenparekraf No.9 Tahun 2021).</li> <li>jumlah lokasi destinasi pariwisata yang melakukan pengukuran atau monitoring dan evaluasi penerapan prinsip pariwisata berkelanjutan pada Permenparekraf No.9 Tahun 2021 dan Permenpar No.10 Tahun 2019 tentang Manajemen Krisis Kepariwisataaan.</li> </ol> <p>Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan</p>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terkelolanya Destinasi Pariwisata Provinsi	Persentase Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola	Positif	Persen	(Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikelola di tahun N dibagi target tahun N)* 100%	Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi Banten	semakin terkelola destinasi pariwisata maka jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan				Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif (Kab/Kota) yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisata. Pembangunan destinasi pariwisata, mencakup pembangunan daya tarik wisata, pembangunan fasilitas pariwisata, pembangunan fasilitas umum pendukung pariwisata, pembangunan prasarana/infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pembangunan investasi pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan. Dalam konteks pedoman ini destinasi didudukkan dalam skala kabupaten/kota dan provinsi – dikaitkan dengan sistem pemerintahan.				100%	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi				Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja dari strategi yang telah disusun. Perancangan adalah Rencana Detail yaitu serangkaian pemikiran dan tindakan mikro yang komprehensif, logis, objektif serta terukur untuk menjadi arah dan dasar pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang dibutuhkan dan perlu dilakukan pada suatu destinasi pariwisata sesuai dengan fungsi dan outlook yang telah ditentukan pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata (RIPKA) Provinsi dan diperlukan untuk mendukung tercapainya visi dan misi RIPKA Provinsi tersebut secara efisien, efektif dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan destinasi unggulan di Provinsi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara				Pengembangan destinasi pariwisata dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang terkait dengan Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (3A). Tiga unsur tersebut perlu dipersiapkan untuk dapat mewujudkan destinasi pariwisata yang dapat memberi kenyamanan yang baik kepada wisatawan. Melalui penyediaan prasarana dan sarana diharapkan destinasi pariwisata dapat menjadi lebih berdaya saing dan dapat memperpanjang lama tinggal (length of stay) wisatawan dengan tetap mempertahankan karakter lokal dan mengutamakan kelestarian lingkungan.				100%	100%	100%	100%	100%	100%	

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata								100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi				Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Evaluasi dilakukan atas pelaksanaan Renja-OPD bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Evaluasi dilakukan untuk melihat sejauh mana intervensi OPD berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan. Hasil evaluasi juga digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan tata Kelola pelaksanaan mendatang. Mengetahui laporan update RIPPARDA di kab/kota, ketersediaan masterplan destinasi pariwisata di kab/kota, jumlah kunjungan wisatawan, data PDRB daerah pariwisata, pembangunan amenitas pariwisata di daerah yang anggarannya dari pusat (13 usaha bidang pariwisata sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan).				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan				Peningkatan kapasitas dilaksanakan dalam format pelatihan atau bimbingan teknis (bimtek) yaitu pemberian pembelajaran secara praktis dalam waktu yang relatif singkat oleh seseorang yang ahli kepada orang lain (peserta) dengan tujuan meningkatkan pemahaman, keterampilan, pengetahuan maupun sikap nilai yang benar dalam bidang pariwisata.				100%	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Peningkatan kapasitas dalam hal Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi dapat menyusun modul pembelajaran dengan merujuk kepada dokumen Pedoman Perencanaan dan Perancangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Contoh : jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimtek atau pelatihan terkait pengelolaan destinasi pariwisata Provinsi.									
Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi				Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-PROV adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan provinsi untuk periode 15-25 tahun sebagai acuan RIPPAR-KAB/KOTA. Kab/Kota diharapkan dapat mensinkronkan RIPPAR-KAB/KOTA dengan RTRW dan RDTR.				100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terfasilitasinya Rekomendasi Teknis Usaha Pariwisata yang di terbitkan	Persentase Rekomendasi Teknis Usaha Pariwisata yang di terbitkan	Positif	Persen	(Jumlah Rekomendasi Teknis Usaha Pariwisata yang di keluarkan tahun n di bagi jumlah pengajuan rekomendasi tahun n ) * 100%	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Provinsi adalah proses administratif dan legal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi untuk memberikan izin atau pengakuan resmi terhadap usaha pariwisata yang beroperasi di lebih dari satu wilayah kabupaten atau kota dalam satu provinsi. Proses ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	semakin banyak rekomendasi teknis usaha yang diterbitkan maka semakin terpercaya dan terkelola destinasi pariwisata	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan				Fasilitasi kegiatan pendampingan penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mendapatkan investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021									

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)				Catatan : Sesuai dengan PP Nomor 5 tahun 2021 Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak lagi menjadi satu kewajiban diubah dengan Izin Usaha									
Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi				Perhitungan data Jumlah Investasi usaha Pariwisata melalui pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi/Kab/Kota									
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Promosi Objek wisata provinsi	Positif	Persen	(Jumlah objek wisata yang di promosikan tahun n di bagi jumlah objek wisata provinsi) x 100%	Program Pemasaran Pariwisata adalah objek wisata yang di promosikan pada media online dan offline. Jumlah objek wisata provinsi adalah jumlah objek wisata yang terdata pada SIMPARDA.	semakin banyak jumlah objek wisata yang di promosikan maka jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	4,80%	5,18%	6,21%	7,25%	8,28%	9,32%
terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Positif	Persen	(Jumlah objek wisata yang di promosikan di tahun N dibagi target tahun N)* 100%	Jumlah objek wisata provinsi adalah jumlah objek wisata yang terdata pada SIMPARDA.	semakin banyak jumlah objek wisata yang di promosikan maka jumlah kunjungan wisatawan akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Unit Dokumen)				Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri adalah Terpublikasikannya destinasi pariwisata melalui media digital, media sosial, dan owned media, media elektronik, media cetak, dan media luar ruang baik dalam dan luar negeri dalam rangka penguatan promosi pariwisata dengan satuan promosi, berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pemasaran, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dilaksanakan oleh unit kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Terlaksananya Monitoring dan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring				Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata			Dinas Pariwisata						

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Satuan : Unit Dokumen)				adalah dua proses yang saling terkait dan esensial dalam memastikan keberhasilan program pemasaran. Monitoring adalah proses pengawasan sistematis dan berkelanjutan terhadap pelaksanaan semua kegiatan pemasaran pariwisata untuk memastikan bahwa setiap aktivitas berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan data secara rutin tentang berbagai kegiatan promosi, kampanye iklan, partisipasi dalam pameran, serta aktivitas pemasaran digital. Tujuan utama monitoring adalah untuk mengidentifikasi penyimpangan atau masalah yang muncul sejak dini dan memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif. Di sisi lain, evaluasi adalah proses analisis menyeluruh yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan untuk menilai keberhasilan dan dampak dari program pemasaran pariwisata. Evaluasi melibatkan pengukuran hasil terhadap target dan indikator kinerja utama (Key Performance Indicators/KPIs), seperti jumlah kunjungan wisatawan, tingkat partisipasi dalam acara, dan tingkat engagement di media sosial. Evaluasi bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan program, memberikan umpan balik untuk perbaikan, dan menyusun rekomendasi strategis untuk pengembangan program pemasaran di masa depan. Kombinasi monitoring dan evaluasi memungkinkan manajemen yang responsif dan adaptif,			ta Provinsi Banten							

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					serta peningkatan berkelanjutan dalam strategi pemasaran pariwisata									
Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Kegiatan)				Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam bentuk sales mission, exhibition, festival, dan famtrip dengan outputnya adalah jumlah kegiatan dengan satuan laporan, berdasarkan Permen, Juklak dan Juknis dan dilaksanakan oleh unit kerja di Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Positif	Persen	(Jumlah pelaku ekraf yang memiliki HKI di bagi Σ Jumlah total Pelaku Ekraf) X 100 %	Pelaku Ekraf yang memiliki HKI adalah pelaku ekraf yang telah terfasilitasi HKI pada Kementerian Hukum.	semakin banyak pelaku ekraf yang memiliki HKI maka semakin meningkat daya saing pelaku usaha pariwisata	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	5,76%	6,91%	8,06%	9,22%	10,37 %	11,52 %
Meningkatnya Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Positif	Persen	(Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar di bagi jumlah pelaku ekraf yang mendapat fasilitasi)* 100%	Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Akses ke Sumber Permodalan adalah pelaku ekonomi kreatif yang telah mendapat akses modal ke lembaga keuangan.	Semakin banyak pelaku Ekraf yang mendapatkan akses permodalan maka usaha pariwisata akan cepat bertumbuh	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar				Keterlibatan lintas pelaku, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha (quadruple-helix) dalam berbagi tugas dan peran, sehingga menghasilkan upaya yang kolaboratif dan sinergis dalam penumbuhkembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi sebagai kunci utama pengembangan kota kreatif			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula				Keterlibatan lintas pelaku, yaitu pemerintah, komunitas, akademisi dan pelaku usaha (quadruple-helix) dalam berbagi tugas dan peran, sehingga menghasilkan adanya peningkatan usaha kreatif			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik				Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik adalah kegiatan Penambahan daya jangkauan penjualan produk penjualan produk kreatif dalam bentuk exhibition dan festival baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dokumen pelaporan yang dibuat oleh OPD memuat potensial transaksi ekraf			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Meningkatnya Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Positif	Persen	(Jumlah pelaku ekraf yang memiliki HKI di tahun n dibagi target pelaku ekraf yang difasilitasi tahun n)* 100%	Pelaku Ekraf yang memiliki HKI adalah pelaku ekraf yang telah terfasilitasi HKI pada Kementerian Hukum.	semakin banyak pelaku ekraf yang memiliki HKI maka semakin meningkat daya saing pelaku usaha pariwisata	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah				Daerah diharapkan menyusun dokumen strategis bidang ekraf daerah yang menghasilkan peta jalan (road map) yang mengacu pada pedoman penyusunan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif daerah			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual				Kegiatan Fasilitasi Konsultasi KI bertujuan agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif meningkatkan pemahaman Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta memahami cara pengelolaan, pemanfaatan, pencegahan terkait pelanggaran HKI. Sertifikat HKI tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi para pemiliknya dalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Dengan demikian pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengoptimalkan nilai HKI mereka dan melindungi aset intelektual secara efektif.			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah				Penguatan tata kelola kelembagaan ekonomi kreatif daerah mencakup inisiasi, koordinasi, dan pendirian badan hukum lembaga/asosiasi/pelaku usaha			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah				Daerah diharapkan dapat menyusun Rencana Aksi berdasarkan peta jalan (road map) yang telah disusun sebelumnya dengan mengacu pada pedoman penyusunan peta jalan pengembangan ekonomi kreatif daerah			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				Pengembangan Sistem Pemasaran adalah upaya menyusun sistem baru atau memperbaiki sistem pemasaran ekonomi kreatif yang telah ada agar dapat menjangkau lebih luas dengan satuan laporan, berdasarkan Rencana Strategis Deputi Bidang Pemasaran Tahun 2020 - 2024 dan dilaksanakan oleh Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif merupakan kegiatan penyediaan ruang dan sarana bagi pelaku ekonomi kreatif sebagai tempat berjejaring dalam rangka menciptakan inovasi dan kreativitas.			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Presentase pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Positif	Persen	(Jumlah pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi di Tahun n dibagi Total Pelaku Pariwisata dan Ekraf ) * 100%	pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan sertifikasi oleh BNSP.	semakin banyak pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi maka kompetensi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	2,11%	2,41%	2,71%	3,01%	3,31%	3,61%
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Positif	Persen	(Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Tingkat Lanjutan di tahun n dibagi target tahun n) * 100%	pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi adalah Pelaku Pariwisata yang telah mendapatkan sertifikasi oleh BNSP.	semakin banyak pelaku Pariwisata yang Aktif dan Tervalidasi maka kompetensi pelaku pariwisata akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata adalah kegiatan pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) kepada para tenaga kerja bidang pariwisata dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi Di Bidang Pariwisata			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan				Pengembangan Kapasitas Masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam pengembangan Pariwisata. Pelatihan atau Bimtek diberikan kepada masyarakat di sekitar destinasi wisata			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				dan desa wisata dengan muatan pengetahuan tentang pengembangan usaha Pariwisata									
Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				Program pelatihan pelaku ekonomi kreatif berbasis kompetensi (17 subsektor ekraf, UU 24 tahun 2019) yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi (PBK) yang pelaksanaan sesuai dengan Permenaker No 8 Tahun 2014			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						
Meningkatnya Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Positif	Persen	(Jumlah Peningkatan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif di tahun n dibagi target tahun N)* 100%	pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah mendapatkan sertifikasi oleh BNSP.	semakin banyak pelaku Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi maka kompetensi pelaku ekonomi kreatif akan meningkat	Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia ekonomi kreatif, melalui Bimbingan teknis, pelatihan, pendampingan dan wirausaha digital mandiri, untuk menciptakan SDM yang unggul, dan berdaya saing serta siap berwirausaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan seluas luasnya.			Dinas Pariwisata Provinsi Banten						

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif				Sertifikasi Kompetensi subsektor Ekonomi Kreatif adalah kegiatan Pelaksanaan Uji Kompetensi yang dilakukan LSP P3 Sub Sektor Ekonomi Kreatif terhadap SDM Ekonomi Kreatif dengan satuan orang, berdasarkan NSPK Undang-undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018 - 2025			Dinas Pariwisata Provinsi Banten							
Meningkatnya Tata Kelola pemerintahan pada Dinas Pariwisata	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Pariwisata	Positif	Nilai	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Tingkat Perangkat Daerah	Penilaian Indeks Reformasi Perangkat Daerah pada level Perangkat Daerah adalah proses evaluasi terukur yang dilakukan untuk menilai capaian kinerja reformasi birokrasi pada masing-masing perangkat daerah di lingkungan pemerintah provinsi. Penilaian ini mengacu pada indikator dan aspek yang ditetapkan dalam kebijakan reformasi birokrasi nasional dan daerah, yang mencakup area perubahan struktural, manajerial, dan kultural.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	58	60	62	64	66	68	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKP Perangkat Daerah	Positif	Nilai	Penilaian SAKP Perangkat Daerah	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Perangkat Daerah Tahun N-1 adalah proses evaluasi terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh perangkat daerah berdasarkan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran pada tahun anggaran sebelumnya (Tahun N-1). Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana perangkat daerah mampu merencanakan, melaksanakan, mengukur, dan mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome).		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	75	76	77	78	79	80	

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen pelaporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai SAP(Standar akuntansi pemerintah)	Positif	Persen	jumlah laporan keuangan yg disusun/Jumlah Laporan sesuai SAP *100	Pelaporan Keuangan Akhir Tahun adalah dokumen resmi yang disusun oleh Perangkat Daerah (PD) yang memuat informasi keuangan secara komprehensif dan transparan atas seluruh aktivitas keuangan selama satu tahun anggaran. Pelaporan ini disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terkelolanya BMD secara tertib	persentase BMD yang tertib pencatatan dan fisik	Positif		Jumlah Aset yang tersedia / Jumlah Aset yang tercatat x 100	Perbandingan antara jumlah yang tersedia dengan jumlah aset yang tercatat adalah proses verifikasi dan evaluasi kesesuaian antara jumlah fisik aset/barang milik daerah yang nyata (tersedia di lapangan) dengan jumlah aset yang tercatat dalam administrasi atau sistem pencatatan resmi (misalnya SIMDA BMD atau Neraca Daerah). Kegiatan ini merupakan bagian dari pengendalian dan pengawasan internal terhadap aset daerah untuk menjamin akurasi, keberadaan, dan keabsahan aset yang dikuasai.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya prestasi kinerja ASN	Persentase ASN perangkat daerah yang memiliki predikat SKP minimal BAIK	Positif	Persen	Jumlah ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai minimal BAIK / Jumlah ASN Perangkat Daerah x 100%	Perbandingan Jumlah ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Predikat Minimal "BAIK" adalah indikator kinerja yang mengukur persentase pegawai aparatur sipil negara (ASN) di suatu Perangkat Daerah yang memperoleh nilai kinerja tahunan (berdasarkan Penilaian Kinerja Individu/PPK) dengan predikat sekurang-kurangnya "BAIK", dibandingkan dengan total seluruh ASN yang aktif di perangkat daerah tersebut pada tahun berjalan.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	95%	95%	95%	95%	95%	95%

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGE T 2025	TARGE T 2026	TARGE T 2027	TARGE T 2028	TARGE T 2029	TARGE T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terkelolanya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang dikelola dengan baik	Positif	Persen	Jumlah Administrasi Umum yang terpenuhi tahun N / Jumlah Administrasi Umum yang ditargetkan pada tahun N x 100	Terkelolanya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Tahun N adalah kondisi di mana seluruh kebutuhan dasar administratif dan operasional umum di lingkungan perangkat daerah telah direncanakan, disediakan, didistribusikan, dan dimanfaatkan secara efektif selama satu tahun anggaran (Tahun N). Kebutuhan ini mencakup aspek perkantoran seperti alat tulis kantor (ATK), perlengkapan kerja, dokumen resmi, fasilitas komunikasi dan dokumentasi, serta dukungan teknis operasional lainnya yang diperlukan untuk kelancaran fungsi administrasi perangkat daerah.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana kantor sesuai standar	Persentase kebutuhan BMD terpenuhi	Positif	Persen	Jumlah Sarana Prasarana yang dibelanjakan tahun N / Jumlah Sarana Prasarana Sesuai RKBMD x 100	Perbandingan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kantor Sesuai Standar dengan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tercantum dalam Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) adalah indikator yang mengukur tingkat kesesuaian antara jumlah ideal sarana dan prasarana kantor (berdasarkan standar kebutuhan minimal yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi teknis) dengan jumlah sarana dan prasarana yang direncanakan atau diusulkan oleh perangkat daerah dalam dokumen RKBMD.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KINERJA TUJUAN/SASARAN/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SIFAT INDIKATOR	UKURAN/S ATUAN	RUMUS PENGHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	INTERPRETASI DATA	FREKUENSI PENGUMPULAN DATA	SUMBER DATA	TARGET T 2025	TARGET T 2026	TARGET T 2027	TARGET T 2028	TARGET T 2029	TARGET T 2030
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Terkelolanya pelayanan penunjang kantor	Persentase terpenuhinya pelayanan penunjang kantor	Positif	Persen	jumlah pelayanan penunjang kantor yang dipenuhi/ jumlah pelayanan yang diperlukan x 100	Perbandingan Pelayanan Jasa Penunjang Kantor dengan Jumlah Pelayanan yang Diperlukan adalah indikator yang mengukur tingkat pemenuhan kebutuhan jasa penunjang kantor oleh perangkat daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini membandingkan jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia atau terealisasi dengan jumlah layanan yang dibutuhkan sesuai perencanaan atau standar operasional minimal.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%
terpenuhinya pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	Positif	Persen	Jumlah BMD yang dipelihara Tahun N/ jumlah BMD yang direncanakan dipelihara Tahun N x 100%	Perbandingan antara Barang Milik Daerah (BMD) yang Dipelihara pada Tahun N dengan Jumlah BMD yang Direncanakan untuk Dipelihara adalah indikator kinerja yang mengukur tingkat realisasi pemeliharaan BMD terhadap rencana pemeliharaan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan (seperti RKBMD atau Rencana Kebutuhan Pemeliharaan). Indikator ini mencerminkan efektivitas dan kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan aset daerah.		Tahunan	Dinas Pariwisata Provinsi Banten	100%	100%	100%	100%	100%	100%



ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AKHIR	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						ABAI KEBIBAKUAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	BIDANG ULUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR			
						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030							Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif	Targ et	Pagu Indikatif				
																																							Targ et	Pagu Indikatif	Targ et
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)		
																							Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi		100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
																							Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Terawat dan Terpelihara		700.000.000	5	800.000.000	5	1.100.000.000	5	1.200.000.000	5	1.400.000.000	5	1.500.000.000				
																							Pengutan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi		Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata		300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000	4	300.000.000				
																							Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi		300.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000	4	400.000.000				
																							Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategi Provinsi yang Dikembangkan		183.432.000	100	175.382.000	100	203.655.000	100	248.216.000	100	257.729.000	100	264.409.000				
																							Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi		Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi		300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000				
																							Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasi	Pemertaaan Rekomendasi Teknis Usaha Pariwisata yang di terbitkan		100	100	450.000.000	100	250.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000		
																							Fasilitasi Pendampingan Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)		Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi) (Sajian - LHR Usaha)		2	2	250.000.000	2	150.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000		
																							Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi		Jumlah laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi (Sajian - laporan)		1	1	200.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		

ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						ABAI KEBIAYAAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN										KONDISI AKHIR			
						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030						2025	2026	2027	2028	2029	2030								
																																	TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF		TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	
																					Meningkatkan kunjungan wisatawan	1. Penguatan EA (etika, amenities, aksesibilitas, ancillary, dan available package) pada destinasi unggulan provinsi melalui penguatan regulasi. 2. Pengembangan kawasan dan dukungan event pariwisata provinsi yang berketanjutan berbasis Kearifan dan sumber daya lokal.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya pemasaran pariwisata	Perentase Peningkatan Promosi Objek wisata provinsi (Satuan: persen)	4,41%	4,80%	1.835.602.000	5,18%	1.800.000.000	6,21%	1.985.039.000	7,25%	2.099.168.000	8,28%	2.336.936.000	9,32%	2.386.724.000	9,32%	
																						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Pariwisata Provisi	Terlaksananya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Perentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	100	100	1.835.602.000	100	1.800.000.000	100	1.985.039.000	100	2.099.168.000	100	2.336.936.000	100	2.386.724.000			
																						Pengatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pengatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Unit Dokumen)	3	3	600.000.000	3	500.000.000	3	600.000.000	3	600.000.000	3	700.000.000	3	700.000.000				
																						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata (Satuan : Upr1 Dokumen)	4	5	700.000.000	1	700.000.000	1	750.000.000	1	800.000.000	1	900.000.000	1	900.000.000				
																						Facilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Satuan : Kegiatan)	3	3	535.602.000	2	600.000.000	2	635.039.000	2	699.168.000	2	736.936.000	2	786.724.000				
																						Meningkatkan Kontribusi Ekonomi Kreatif	Pembangunan ekosistem ekonomi kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PAMANAFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAWANAN INTELLEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Perentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Satuan: persen)	4,61%	5,76%	1.122.340.000	6,91%	1.174.618.000	8,06%	1.213.730.000	9,22%	1.283.491.000	10,37%	1.428.870.000	11,52%	1.459.312.000	11,52%
																						Penyediaan Sarana dan Prasarana Hota Kreatif	Meningkatnya Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produk dan Pasar bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Perentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang mendapatkan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produk dan Pasar	100	100	422.340.000	100	474.618.000	100	513.710.000	100	583.491.000	100	728.870.000	100	759.312.000			
																						Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi hingga Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produk dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produk dan Pasar	1	1	122.340.000	1	124.618.000	1	163.710.000	1	183.491.000	1	228.870.000	1	209.312.000				



ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL	ABAI KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN										KONDISI AWAL		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030								2025	2026	2027	2028	2029	2030							
																																			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF		TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)		
				</																																					

ISU STRATEGIS PELAYAN PERANGKAT DAERAH	VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL (2024)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL (2024)	ABAI KEBIBAKAAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	BIJAK ULUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN										KONDISI AWAL (2024)												
						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030								2025	2026	2027	2028	2029	2030																	
																																			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF		TARGET	PAGU INDIKATIF										
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)					(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)								(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)

ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL (2024)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL (2024)	ABAI KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN										KONDISI AWAL (2024)		
						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030								2025	2026	2027	2028	2029	2030							
																																			Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif		Target	Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)		
																										18	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	18	5.000.000	
																										1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
																										100	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	100	4.000.000	
																										2	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	
																										100	100	55.000.000	95	55.000.000	95	55.000.000	95	55.000.000	95	55.000.000	95	55.000.000	95	55.000.000	
																										2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	
																										100	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	100	40.000.000	
																										100	100	955.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	100	600.000.000	
																										1	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	
																										4	4	150.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	4	120.000.000	
																										2	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	
																										3	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	



ISU STRATEGIS PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	VISI KEPALA DAERAH	MISI KEPALA DAERAH	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL (2024)	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR SASARAN DAERAH (INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU))	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN						KONDISI AWAL (2024)	ABAI KEBIBAKUAN PERANGKAT DAERAH	STRATEGI PERANGKAT DAERAH	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR PROGRAM/INDIKATOR SUB KEGIATAN	KONDISI AWAL (2024)	TARGET CAPAIAN										KONDISI AWAL (2024)				
						2025	2026	2027	2028	2029	2030					2025	2026	2027	2028	2029	2030								2025	2026	2027	2028	2029	2030									
																																			TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF		TARGET	PAGU INDIKATIF	TARGET	PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)				
																								Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terpenuhinya pemeliharaan BMD pada perangkat daerah	Pemertasa Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik	100	100	761.356.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000	100	660.000.000
																								Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perangkoan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan		Jumlah Kendaraan Perangkoan Dinas atau Kendaraan Dinas abatan yang Dipelihara dan Dibayar dan Pajaknya	6	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000	6	250.000.000
																								Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayar dan Pajak dan Perawatannya	25	25	210.000.000	26	210.000.000	26	210.000.000	26	210.000.000	26	210.000.000	26	210.000.000	26	210.000.000		
																								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang Dipelihara	76	76	100.000.000	76	100.000.000	76	100.000.000	76	100.000.000	76	100.000.000	76	100.000.000	76	100.000.000		
																								Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi	1	1	201.356.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000		

### e. Program Prioritas Pembangunan

MISI	8 PROGRAM UNGGULAN	24 PROGRAM TURUNAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI PROYEK STRATEGIS	OUTPUT	VOLUME	KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF								
								Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target
MENDORONG KEMAJUAN EKONOMI SECARA INKLUSIF MELALUI PENGUATAN SEKTOR KREATIF, UNGGULAN, DAN POTENSIAL	BANTEN INDAH	BANGSONI	PENINGKATAN PRODUKTIVITAS EKONOMI	DUKUNGAN LAYANAN TAMBAHAN (ANCILLARY SERVICES) DAN PAKET WISATA YANG TERSEDIA (AVAILABLE PACKAGE)	1. Promosi paket wisata (Kolaborasi dengan travel agent)	10 Kegiatan	1.000.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	2 Kegiatan	200.000.000	200.000.000
					2. Gebyar Wisata Banten	5 Kegiatan	2.200.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	400.000.000	1 Kegiatan	500.000.000	1 Kegiatan
	BANTEN INDAH	ASYIK	PENGEMBANGAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA UNGGULAN	1. Penataan destinasi Wisata Unggulan	10 Lokasi	2.000.000.000	2 Lokasi	400.000.000	2 Lokasi	400.000.000	2 Lokasi	400.000.000	2 Lokasi	400.000.000	2 Lokasi	400.000.000
				2. Pengembangan Wisata Religi	15 Lokasi	6.000.000.000	3 Lokasi	1.200.000.000	3 Lokasi	1.200.000.000	3 Lokasi	1.200.000.000	3 Lokasi	1.200.000.000	3 Lokasi	1.200.000.000
				3. Pengembangan SDM Pariwisata	500 Orang	1.580.000.000	100 Orang	300.000.000	100 Orang	315.000.000	100 Orang	315.000.000	100 Orang	325.000.000	100 Orang	325.000.000
	BANTEN INDAH	ASYIK	PENGEMBANGAN GEOPARK, TAMAN HUTAN RAYA, DAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) PARIWISATA	Pengembangan infrastruktur TAHURA/GEOPARK/KEK	5 Lokasi	2.000.000.000	1 Lokasi	400.000.000	1 Lokasi	400.000.000	1 Lokasi	400.000.000	1 Lokasi	400.000.000	1 Lokasi	400.000.000
	BANTEN INDAH	ASYIK	DUKUNGAN ATRAKSI (ATTRACTION), AMENITAS (AMENITIES), DAN AKTIVITAS (ACTIVITY) PADA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI	1. Pertunjukan Kesenian Lokal di KSPP	15 Lokasi	7.500.000.000	3 Lokasi	1.500.000.000	3 Lokasi	1.500.000.000	3 Lokasi	1.500.000.000	3 Lokasi	1.500.000.000	3 Lokasi	1.500.000.000
				2. Gerakan Pesona Wisata Banten	10 Lokasi	4.000.000.000	2 Lokasi	800.000.000	2 Lokasi	800.000.000	2 Lokasi	800.000.000	2 Lokasi	800.000.000	2 Lokasi	800.000.000
				3. Pemberdayaan Pelaku Usaha Pariwisata	50 Lokasi	5.000.000.000	10 Lokasi	1.000.000.000	10 Lokasi	1.000.000.000	10 Lokasi	1.000.000.000	10 Lokasi	1.000.000.000	10 Lokasi	1.000.000.000
	BANTEN INDAH	ASYIK	DUKUNGAN PERTUNJUKAN BUDAYA LOKAL (RELIGI, ALAM, DAN BUATAN)	1. Promosi Wisata Unggulan (Alam, Budaya, Religi, dan Buatan)	35 Objek Wisata	1.500.000.000	8 Objek Wisata	300.000.000	8 Objek Wisata	300.000.000	8 Objek Wisata	300.000.000	8 Objek Wisata	300.000.000	8 Objek Wisata	300.000.000
				2. Partisipasi Event Budaya Lokal	35 Event	4.000.000.000	8 Event	800.000.000	8 Event	800.000.000	8 Event	800.000.000	8 Event	800.000.000	8 Event	800.000.000

MISI	8 PROGRA M UNGGU LAN	24 PROGR AM TURUN AN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKASI PROYEK STRATEGIS	OUTPUT	VOLU ME	KEBUTUHAN	PAGU INDIKATIF									
								Target	2026	Target	2027	Target	2028	Target	2029	Target	2030
	BANTEN KUAT	EKO BANTE N		PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF YANG DIINTEGRASIKAN DENGAN PUSAT- PUSAT DESTINASI WISATA	1. Festival Ekraf Banten		2.500.000.00 0	1 kegiatan	500.000.00 0	1 kegiatan	500.000.00 0	1 kegiatan	500.000.00 0	1 kegiatan	500.000.00 0	1 kegiatan	500.000.00 0
					2. Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	500 Orang	1.580.000.00 0	100 Orang	300.000.00 0	100 Orang	315.000.00 0	100 Orang	315.000.00 0	100 Orang	325.000.00 0	100 Orang	325.000.00 0
MEWUJUD KAN MASYARAK AT BERMORAL PANCASILA DAN DEMOKRAT IS BERLANDAS KAN IMAN DAN TAQWA MELALUI REFORMASI BIROKRASI YANG BERINTEGRITAS, ADAPTIF, DAN TANGGUH	BANTEN MELAYA NI	TEROB OS	TRANSFORMASI ORGANISASI/KELEM BAGAAN YANG BERKAPABILITAS TINGGI, LINCAH, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF	DUKUNGAN PEMANFAATAN ASET DAERAH	Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pariwisata	108 Unit	4.350.000.00 0	1 Laporan	870.000.00 0	1 Laporan	870.000.00 0	1 Laporan	870.000.00 0	1 Laporan	870.000.00 0	1 Laporan	870.000.00 0
				INVENTARISASI DAN PENATAAN ASET PERANGKAT DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Dinas Pariwisata	5 laporan	20.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	4.000.000
<b>JUMLAH</b>							<b>45.230.000. 000</b>		<b>8.974.000. 000</b>		<b>9.004.000. 000</b>		<b>9.004.000. 000</b>		<b>9.124.000. 000</b>		<b>9.124.000. 000</b>